

**PERAN UNDP-GEF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KAWASAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU MELALUI PROYEK EPASS**

PERIODE 2016-2020

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ZELYA NADIA KIRANA

18323174

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PERAN UNDP-GEF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KAWASAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU MELALUI PROYEK EPASS
PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ZELYA NADIA KIRANA

18323174

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN UNDP-GEF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU
MELALUI PROYEK EPASS PERIODE 2016-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

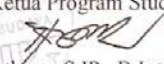
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
Rabu, 29 Juni 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

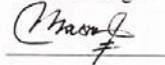
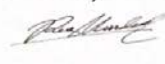
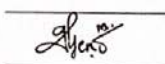
Ketua Program Studi


Hanga Fathana, S.IP., B.Int. St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

24 Mei 2022,

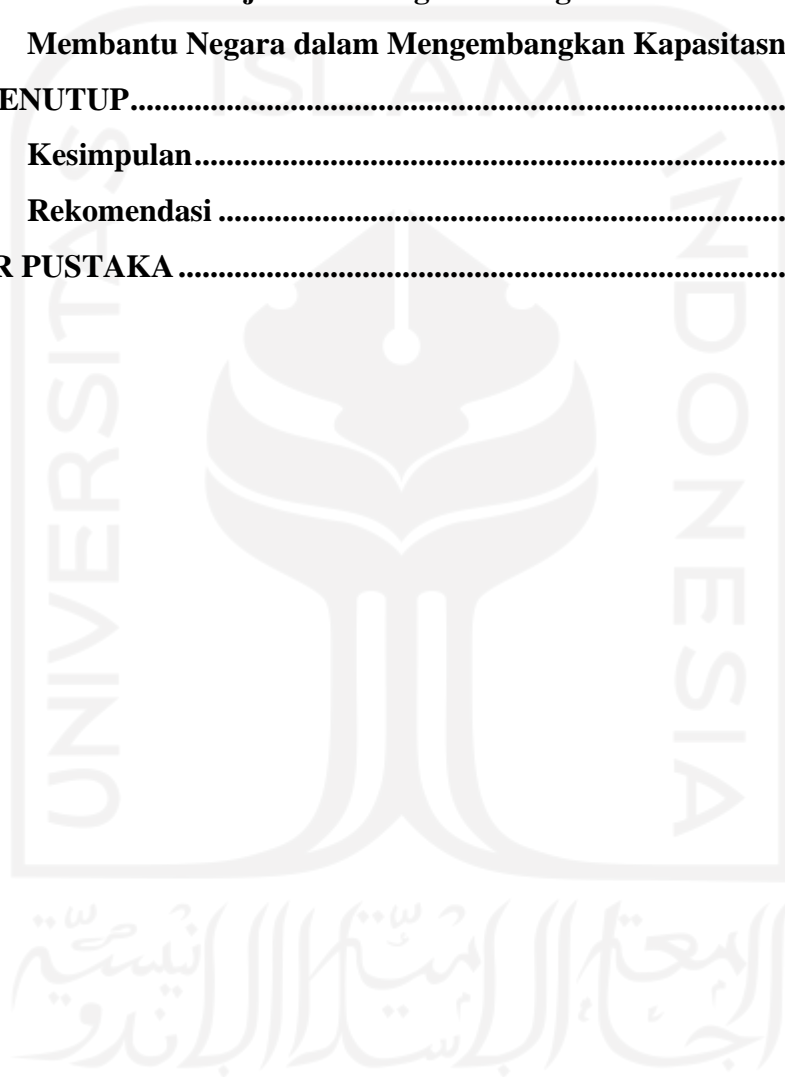
A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '2EEAJX839022788'.

Zelya Nadia Kirana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Tinjauan Pustaka	6
1.5 Landasan Teori/Konsep	8
1.6 Argumen Sementara	12
1.7 Metodologi Penelitian	13
1.7.1 Jenis Penelitian.....	13
1.7.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.7.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.7.4 Proses Penelitian	15
1.8 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 UNDP-GEF DAN <i>CONVENTIONAL ON BIOLOGICAL DIVERSITY</i> (CBD) TAMAN NASIONAL LORE LINDU	18
2.1 UNDP-GEF dalam proyek EPASS	18
2.2 <i>Conventional on Biological Diversity (CBD) Taman Nasional Lore Lindu</i> 25	

BAB 3 IMPLEMENTASI PROGRAM <i>MANAGERIAL APPROACH</i> DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMAN NASIONAL LORE LINDU	34
3.1 Memberikan Bantuan Teknis dan Keuangan	34
3.2 Melakukan pengawasan melalui berbagai aktor	41
3.3 Melakukan Kerja Sama dengan Berbagai Aktor	47
3.4 Membantu Negara dalam Mengembangkan Kapasitasnya	50
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Pertanyaan Wawancara	67
Lampiran 2. <i>Interview Transcript</i>	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional	8
Tabel 2.1 Sumber Mata Pencaharian Penduduk Desa Pakuli Utara dan Simoro.....	24
Tabel 2.2 Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup	30



DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBTNLL	: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CBD	: <i>Conventional on Biological Diversity</i>
EPASS	: <i>Enhancing Protected Area System In Sulawesi</i>
GEF	: <i>Global Environment Facility</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KKH	: Konservasi Keanekaragaman Hayati
KLHK/LHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LPKD	: Lembaga Pengelola Konservasi Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
METT	: <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
PEH	: Pengendali Ekosistem Hutan
PIU	: <i>Projet Implementing Unit</i>
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMU	: <i>Project Management Unit</i>
Polhut	: Polisi Hutan
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RBM	: <i>Resort Based Management</i>
RKT	: Rencana Kegiatan Tahunan
RPP	: Rencana Pelaksanaan Program
TNC	: <i>The Nature Conservancy</i>
TNLL	: Taman Nasional Lore Lindu
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Agencies</i>
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

ABSTRAK

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran seperti, pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berlebihan, pemasangan jerat, perburuan dan penebangan hutan membuat degradasi dan deforestasi hutan. Sementara, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkait dalam *Conventional on Biological Diversity* (CBD) pelanggaran kawasan konservasi yang terus terjadi dan upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan sebelumnya tidak memberi hasil maksimal membuat Indonesia tidak dapat memenuhi komitmen internasionalnya. Dengan adanya UNDP-GEF melalui proyek *Enhancing Protected Area System In Sulawesi* (EPASS) memberi pengaruh kepada Indonesia untuk mengimplementasikan dan patuh terhadap *Conventional on Biological Diversity* (CBD). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi UNDP-GEF melalui proyek EPASS dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu tahun 2016-2020 dengan pendekatan *managerial* sehingga menghasilkan keberhasilan mengenai terciptanya pengelolaan kawasan konservasi secara baik dan efektif melalui pemberian hak akses kelola lembaga, akses kelola kawasan, dan akses usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna mematuhi *Conventional on Biological Diversity* (CBD).

Kata kunci: UNDP-GEF, Upaya pemberdayaan masyarakat TNLL, *Conventional on Biological Diversity* (CBD), Implementasi Organisasi Internasional.

ABSTRACT

The community's dependence on natural resources in the Lore Lindu National Park (TNLL) area has resulted in many violations, such as excessive non-timber forest products (NTFP) harvesting, trapping, hunting and logging of forests leading to forest degradation and deforestation. Meanwhile, Indonesia is one of the countries involved in the Convention on Biological Diversity (CBD) violations of conservation areas that continue to occur and the government's efforts in carrying out previous management have not provided maximum results, making Indonesia unable to fulfill its international commitments. The existence of UNDP-GEF through the Enhancing Protected Area System In Sulawesi (EPASS) project has influenced Indonesia to implement and comply with the Convention on Biological Diversity (CBD). This study aims to analyze how the implementation of UNDP-GEF through the EPASS project in an effort to empower communities in the Lore Lindu National Park conservation area in 2016-2020 with a managerial approach so as to produce success regarding the creation of good and effective conservation area management through granting access rights to institutional management, access to area management, and business access in accordance with the agreement contained in the Cooperation Agreement (PKS) to comply with the Convention on Biological Diversity (CBD).

Keywords: UNDP-GEF, TNLL community empowerment efforts, Convention on Biological Diversity (CBD), Implementation of International Organizations.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan salah satu kawasan flora dan fauna endemik yang berada di Sulawesi Tengah tepatnya meliputi Kabupaten Sigi seluas 112.792,08 ha dan Kabupaten Poso seluas 102.941,62 ha Sulawesi Tengah. Kawasan ini merupakan area penting bagi masyarakat yang bertempat tinggal sekitar TNLL karena sebagai sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya (Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu 2020), namun keterbatasan masyarakat mengenai pemahaman konservasi dan tingkat ekonomi yang rendah membuat kawasan TNLL memiliki tekanan ancaman yang tinggi akibatnya terjadi pelanggaran seperti pembukaan lahan dan penebangan hutan, pemasangan jera serta pemburuan satwa secara liar sehingga menjadikan degradasi dan deforestasi kawasan TNLL.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemberdayaan guna meningkatkan tingkat efektifitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Lore Lindu namun dalam dinilai melalui laporan implementasi ratifikasi program kerja *Conventional on Biological Diversity* (CBD) belum terpenuhi akibat data yang diperoleh tidak terdokumentasikan dengan baik, selain itu juga telah dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat TNLL salah satunya oleh *The Nature Conservancy* (TNC)

namun dalam pelaksanaannya belum menghasilkan keberlanjutan ekosistem yang adil untuk pencapaian keseimbangan antara masyarakat dan pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Sejalan dengan hal ini, melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD) ke-7 sebanyak 188 negara anggota salah satunya adalah Indonesia telah menyepakati program kerja diantaranya adalah membangun sistem penilaian dan pelaporan efektivitas terhadap kawasan konservasi yang ada di masing-masing negaranya (Adi Widiyanto 2015), sehingga United Nations Development Programme (UNDP) yang merupakan hibah lembaga PBB mempunyai peranan penting bagi Indonesia dalam mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi TNLL, pendanaan yang berkelanjutan, penurunan laju kerusakan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dapat tercapai.

hadirnya UNDP memberikan bantuan materi maupun non-materi yang akan diterima oleh negara, dengan ini memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menyediakan bantuan logistik dalam kelembagaan Global Environment Facility (GEF) yang merupakan institusi keuangan multilateral bidang lingkungan (Hafiz 2016).

Kekurangan dan keterbatasan masyarakat yang tinggal dalam daerah kawasan Taman Nasional Lore Lindu memberi banyak dampak terhadap masyarakat tersebut. Kurangnya mata pencaharian serta pertumbuhan penduduk tercatat dalam Badan

Pusat Statistik Kabupaten Sigi hingga tahun 2020 mencapai 239.421 ribu jiwa (Sigi 2020), hal ini membuat banyaknya kebutuhan dan besarnya tanggungan yang harus mereka terima.

Mata pencaharian penduduk desa kawasan konservasi sebagian besar adalah petani, pola hidup tradisional dan adat istiadat yang masih melekat membuat keterikatan antara alam dan masyarakat desa sangatlah kuat dan hubungan ketergantungan masyarakat dengan alam sangatlah erat. Kurangnya motivasi dan bimbingan yang didapatkan masyarakat sekitar kawasan memberi ketidakpahaman mereka mengenai apa arti dari “konservasi”, sehingga terjadinya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dengan adanya penambahan jumlah penduduk sudah pasti bertambahnya kebutuhan hidup mereka terhadap alam. Dengan segala keterbatasan tersebut membuat siklus kehidupan masyarakat desa yang tinggal di sekitar Taman Nasional Lore Lindu menjadi tidak berkembang (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Dalam hal ini, UNDP-GEF membantu negara Indonesia salah satunya melalui *review portfolio* yang bertujuan untuk melihat proses kerja sama antara Pemerintah Indonesia dari sisi keseluruhan. Pada *portfolio* tersebut kegiatan hibah *Enhancing The Protected Area System In Sulawesi* (E-PASS) merupakan salah satunya, proyek ini adalah dukungan UNDP-GEF kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016-2020 dalam pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) (UNDP, GEF - Enhancing Protected Area in Sulawesi (E-PASS) 2016). Melalui

proyek EPASS hasil yang diharapkan adalah perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Pemerintah Desa melalui kesepakatan konservasi masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengakses sumber daya alam TNLL untuk meningkatkan usaha ekonominya.

Kerja sama UNDP-GEF dan Kementerian LHK merupakan upaya untuk penerapan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan jumlah pendapatannya, serta pendidikan dan penyadartahuan mengenai kawasan konservasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Masyarakat harus diberdayakan melalui pemberdayaan lembaga dengan membentuk Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa (LPKD) yang dimonitoring oleh perwakilan UNDP Indonesia sehingga terciptanya norma dan aturan, pemberdayaan dilakukan untuk kelola kawasan adalah pelaksanaan program 5 tahun guna menyusun apa saja yang akan dikelola, pemberdayaan usaha mikro didukung dengan pembiayaan melalui dana hibah untuk peningkatan usaha (UNDP, GEF - Enhancing Protected Area in Sulawesi (E-PASS) 2016).

Kawasan TNLL resmi menjadi taman nasional melalui surat keputusan No. 593/KptsII/1993 dan ketetapan ini memberikan arti bahwa TNLL menjadi salah satu kawasan pelestarian alam yang harus dilindungi karena kawasan tersebut menjadi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Kassa 2009).

Penulis tertarik memilih topik ini karena penulis ingin melihat bagaimana keberhasilan EPASS terhadap pemenuhan *Conventional on Biological Diversity* (CBD) dengan mewujudkan pengelolaan kolaboratif yang sebelumnya upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun kandas, dan penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana peran UNDP-GEF sebagai organisasi internasional dalam mewujudkan pengelolaan kolaboratif kawasan TNLL dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses kelola lembaga, akses kelola kawasan dan akses kelola usaha di Taman Nasional Lore Lindu 2016-2020 dalam proyek *Enhancing The Protected Area System In Sulawesi* (EPASS) guna meningkatkan pendapatannya, serta pemberdayaan dalam penyadartahuan konservasi, sehingga melalui penelitian ini akan terlihat bagaimana negara Indonesia mencapai tujuannya sesuai dengan *Conventional on Biological Diversity* (CBD) melalui pendekatan *managerial*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi UNDP-GEF dalam *Conventional on Biological Diversity* (CBD) melalui proyek E-PASS dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UNDP-GEF terhadap pemberdayaan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada

tahun 2016-2020 melalui proyek EPASS (*Enhancing The Protected Area System In Sulawesi*)

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul “Peranan Global Environment Facility (GEF) Dalam Membantu Mengatasi Permasalahan Lingkungan di Negara Cina 2010-2014” (Hafhiz 2016) negara Tiongkok menjadi salah satu negara yang banyak disoroti akibat dari tingginya kerusakan lingkungan hidup, karena negara ini merupakan emitor gas tersebar selain Amerika Serikat dan India. Dan melalui permasalahan tersebut China menjadi kategori terbawah dalam pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan dan hal ini menjadi penghambat China dalam perjanjian internasionalnya yaitu mengenai *Convention on Climate Change*. Sejalan dengan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, peran organisasi internasional seperti GEF memberi banyak bantuan terhadap China yang didapatkan China melalui beberapa tahapan bantuan keuangan dan banyaknya agensi Internasional yang terlibat memberikan negara China mendapat kelonggaran dalam membantu China dalam menghadapi permasalahan lingkungannya.

Tulisan Enik Setyowati dalam jurnal penelitiannya berjudul “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi” membahas bagaimana hak asasi perempuan harus dilindungi secara utuh, namun nyatanya masih banyak diskriminasi yang terjadi

terhadap perempuan. Jika tidak ada pengikisan mengenai hal ini akan menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender (Setyowati 2021). Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa selain pemerintah negara juga dibutuhkan campur tangan oleh organisasi internasional dalam penghapusan tindak diskriminasi terhadap perempuan. Seperti halnya yang dilakukan oleh PBB yang memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan membantu negara dalam menghadapi ketidakadilan gender terhadap perempuan.

Tulisan Massiri mengenai “Preferensi dan Motivasi Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi tengah.”, terkait hal ini menjelaskan bahwa masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu memiliki motivasi yang tinggi untuk pengelolaan kawasan TNLL dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari, namun kurangnya pembinaan pihak Balai Besar TNLL dan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat memberi kesulitan pengelolaan bersama kawasan konservasi antara pihak pengelolan kawasan TNLL serta masyarakat setempat (Massiri 2016). Peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang tidak dapat ditangani Indonesia seperti kurangnya sarana dan prasana dalam memenuhi kepatuhannya terhadap konvensi biodiversitas terhadap pengelolaan kawasan konservasi taman nasional sehingga dibutuhkannya peran dari organisasi internasional guna mempengaruhi negara indonesia memenuhi komitmen internasional.

Yang membedakan penelitian ini dengan literatur di atas adalah penulis akan membahas bagaimana implementasi *Conventional on Biological Diversity* (CBD) di kawasan TNLL melalui peran UNDP-GEF pada ranah domestik Indonesia. Melalui pendekatan bersifat pengelolaan (*managerial perspective*), dengan memetakan bagaimana UNDP-GEF melakukan kerja sama dan melakukan pengawasan guna melihat bagaimana komitmen internasional terjalani dengan baik sehingga keberhasilan proyek EPASS dalam melakukan pengelolaan kolaboratif melalui upaya pemberdayaan masyarakat TNLL, penulis berharap penelitian ini dapat menjelaskan dengan baik bagaimana implementasi perjanjian internasional dapat dipatuhi dan dijalankan dengan baik melalui peranan UNDP-GEF di Indonesia.

1.5 Landasan Teori/Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pendekatan implementasi organisasi internasional sebagai landasan berfikir guna memperoleh hasil secara faktual. Dalam implementasi organisasi internasional ada 3 pendekatan dapat dilihat melalui Tabel 1 (Jutta Joachim 2008).

Tabel 1.1 Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

Pendekatan	<i>Enforcement</i>	<i>Managerial</i>	<i>Normative</i>
Sifat	Memaksa	Terbuka dan dapat dikelola	kepercayaan

Metode	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberi sanksi ekonomi, militer, maupun dengan tindakan <i>naming and shaming</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan bantuan teknis dan keuangan ➤ Melakukan pengawasan melalui berbagai aktor ➤ Melakukan kerja sama dengan berbagai aktor ➤ Membantu negara dalam mengembangkan kapasitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menekankan pada otoritas dan legitimasi ➤ Melakukan kontrol terhadap informasi
---------------	---	---	---

Melalui Tabel 1 dapat dilihat bahwa pendekatan pertama yaitu *enforcement approach* merupakan pendekatan yang memaksa mengacu pada strategi hukuman dan perspektif penegakan berlandaskan pada logika konsekuensial, dalam menyetujui sebuah perjanjian negara akan mempertimbangkan keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*). Jika terjadi sebuah pelanggaran maka negara harus siap untuk menjalankan hukuman atau sanksi demi kelancaran implementasi programnya, tetapi jika keuntungan yang akan didapat oleh negara lebih besar biasanya negara akan menyetujui perjanjian walaupun sebenarnya tidak ingin mengimplementasikan perjanjian tersebut.

Sanksi yang didapatkan negara berupa sanksi sosial atau sanksi militer yang merugikan negara, dan memberi sanksi melakukan *naming and shaming* yaitu mempermalukan serta menyebarkan negara yang melanggar kepada publik hal ini dapat mempengaruhi citra negara pelanggar di dunia internasional karena dikenal sebagai negara yang sulit menaati peraturan. Atas dasar sanksi tersebut memberi tekanan kepada negara agar tetap mematuhi peraturan perjanjian.

Pendekatan kedua, pendekatan manajerial (*managerial approach*) yang lebih mengarah pada proses interaksi antara pihak-pihak yang bersangkutan, adanya transparansi dan interpretasi peraturan, pemecahan masalah, dan pengembangan kapasitas negara. Pendekatan ini lebih halus dibanding pendekatan pertama karena pendekatan ini memercayai bahwa aktor mampu mengimplementasikan kerja sama dengan kooperatif. Dalam implementasi perjanjian internasional, pendekatan manajerial meyakini organisasi internasional serta para aktor lainnya mampu berperan penting dalam menjalankan peraturan yang ada, tidak hanya itu organisasi internasional dalam pendekatan ini sangat terbuka dengan aktor lain karena adanya bantuan teknis dan bantuan keuangan yang diberikan para ahli organisasi internasional untuk membangun kapasitas sumber daya manusia.

Untuk menghindari pelanggaran, pendekatan manajerial memiliki 4 tindakan pengawasan. Pertama, pengawasan berupa kewajiban untuk membuat laporan oleh negara anggota terkait aktivitasnya dalam mengimplementasikan organisasi internasional. Kedua, membangun badan pengawas secara khusus untuk mengawasi anggota. Ketiga, mengirim perwakilan organisasi internasional untuk datang ke negara anggota sekaligus mengawasi langsung kegiatan yang dilaksanakan. Terakhir, diawasi dengan laporan bayangan yang didapatkan dari aktor sosial seperti LSM yang memiliki kepentingan yang sama.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan yang menekankan pada otoritas dan legitimasi organisasi internasional yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif memiliki kemiripan dengan pendekatan konstruktivis dalam artian negara-

negara menjadi bagian kepercayaan dari organisasi internasional dipercayai sebagai aktor penting yang memiliki otoritas. Otoritas dalam pendekatan ini terbagi menjadi dua sumber yaitu kontrol terhadap informasi dan keahlian, memberikan negara pengetahuan teknis khusus, pelatihan dan mendapat pengalaman, sehingga membuat negara patuh kemudian melalui kepercayaan bahwa organisasi internasional sebagai aktor yang rasional, dan tidak memihak.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan *managerial approach* untuk melihat bagaimana peran UNDP-GEF dalam dan Pemerintah Indonesia khususnya aktor-aktor yang terlibat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai *Project Management Unit* dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNL) sebagai *Project Implementing Unit* serta pemerintah desa melalui proyek EPASS untuk melakukan pemberdayaan masyarakat kawasan Taman Nasional Lore Lindu dalam pemenuhan komitmen internasional yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD) dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Melalui pendekatan ini, penulis melihat diantara 3 pendekatan tersebut pendekatan *managerial* yang paling relevan karena perspektif *managerial* untuk penerapan agar terpenuhinya perjanjian internasional yakni dengan melakukan proses interaksi antara pihak yang terlibat dalam upaya kepatuhan terhadap perjanjian internasional seperti UNDP-GEF dan Pemerintah Indonesia dengan menekankan pemecahan masalah dan pengembangan kapasitas, serta interpretasi aturan dan transparansi, lebih jelas mengenai konsep implementasi organisasi internasional yang

dikemukakan oleh Jutta Joachim bahwa faktor domestiklah yang mempengaruhi bagaimana pelaksanaan perjanjian internasional dijalankan dengan ini melihat latar belakang masyarakat TNLL dan pihak BBTNLL yang menjadi faktor utama dalam pemenuhan *Conventional on Biological Diversity* (CBD) yang akan dilaksanakan di kawasan konservasi TNLL sehingga dari pendekatan *enforcement, normative* yang paling relevan adalah pendekatan *managerial*.

1.6 Argumen Sementara

Berlandaskan konsep Implementasi Organisasi Internasional, agar negara patuh terhadap perjanjian internasional maka diperlukan peranan dari organisasi internasional yang ditujukan untuk membantu negara dalam memenuhi komitmen internasional dengan memberikan bantuan kepada negara tersebut. Dengan hal ini untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam *Conventional on Biological Diversity* (CBD) ke-7 tahun 2004 mengenai efektivitas pengelolaan taman nasional penulis menggunakan pendekatan *managerial approach*. Melalui pendekatan ini, langkah pertama yang dilakukan proyek EPASS dengan memberdayakan masyarakat TNLL dan selama pelaksanaan proyek akan dijalankan dengan terbuka dan sangat transparan, adanya transparansi terlihat dari bagaimana program ini beroperasi seperti pendanaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan serta dana hibah yang diberikan kepada Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa diketahui oleh pemerintah daerah dan masyarakat desa. Hal *managerial* lainnya bersifat terbuka dapat dilihat dengan keterlibatan pihak lokal seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa,

serta masyarakat setempat. Adanya bantuan dana hibah dalam pemberdayaan masyarakat juga membuktikan bahwa peranan UNDP-GEF sebagai organisasi internasional cukup relevan jika dilihat melalui *managerial approach*. Tidak hanya itu, adanya pengawasan oleh UNDP-GEF mulai dari membentuk badan pengawasan pada tingkat pusat seperti Unit Pelaksana Proyek (UPP), *Project Manager* (PM), *Chief Technical Advisor* (CTA), pengawasan pada tingkat lapangan, pengawasan terkait laporan kegiatan dan keuangan proyek, serta mengutus perwakilan dari UNDP-GEF guna mengawasi dan mengkoordinir proyek EPASS berjalan dengan baik.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam sebuah bentuk perhitungan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan ada data berbentuk angka namun sifatnya tetap deskriptif. Dengan ini, diharapkan tulisan peneliti dapat mendeskripsikan apa saja yang dilakukan UNDP-GEF dan aktor terkait melalui proyek EPASS dalam upaya pemberdayaan masyarakat kawasan TNLL, dan akan ada analisis tindakan UNDP-GEF berdasarkan konsep implementasi organisasi internasional yang membuat penelitian ini bersifat analitis.

1.7.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UNDP-GEF sebagai organisasi internasional yang berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNLL melalui proyek EPASS, serta Kementerian LHK dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Lalu, objek penelitian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat desa Pakuli Utara dan desa Simoro. Oleh karena itu melalui proyek EPASS akan memperlihatkan bagaimana peran organisasi internasional dan aktor negara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat TNLL.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder dan data primer yang akan dikumpulkan dari Desa Pakuli Utara dan Desa Simoro, data ini didapatkan melalui:

1. Observasi

Suatu metode yang dilakukan dengan mengamati langsung untuk mengambil sebuah data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan di Desa Pakuli Utara dan Desa Simoro sekitar Kawasan Taman Nasional Lore Lindu menjadi target utama dalam observasi ini.

2. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber, dalam pengumpulan data wawancara akan dilakukan bersama

perwakilan UNDP-GEF bagian Monitoring and Reporting Officer UNDP Indonesia, Kepala Balai Besar TNLL sebagai koordinator teknis, *Community engagement* E-PASS, Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) dan pemerintah desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil sumber melalui sebuah dokumen yang tertulis maupun dalam elektronik, yang bertujuan sebagai alat pendukung kelengkapan data lainnya.

1.7.4 Proses Penelitian

Dalam sub bab metode penelitian skripsi melalui proses yang dikumpulkan dari berbagai sumber valid yang merujuk pada buku-buku ilmiah, jurnal, serta akan dilakukan wawancara dan observasi agar kebutuhan data terpenuhi dan juga perlu beberapa artikel yang menyangkut dengan teori yang digunakan. Lalu data-data tersebut akan disaring kembali sekaligus peneliti akan menganalisis untuk memberikan banyak definisi dan kata kunci untuk membantu peneliti memahami topik permasalahan yang diteliti. Jika telah mendapatkan jawaban dari penelitian akan dihubungkan dengan teori untuk memperkuat dan menyempurnakan penelitian ini. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan secara mendalam dari penelitian tersebut diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

1.8 Sistematika Pembahasan

Di tahap ini peneliti akan menjelaskan beberapa langkah-langkah selanjutnya dalam proses penyelesaian penulisan tugas akhir seperti berikut :

- Pada Bab 1 pendahuluan berisikan uraian gambaran secara keseluruhan mengenai penjelasan penelitian peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup dan kerangka berfikir.
- Pada Bab 2 berisi pembahasan kondisi masyarakat di kawasan konservasi untuk mengetahui apa saja permasalahan di kawasan tersebut, kemudian melihat upaya yang telah dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui proyek EPASS di Taman Nasional Lore Lindu, dan mengetahui kebijakan apa saja yang berhasil dilaksanakan oleh pemangku kepentingan setempat. Pada bab ini akan terlihat seberapa efektif upaya UNDP-GEF melalui proyek EPASS dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi guna mengetahui bagaimana perannya sebagai organisasi internasional melalui pendekatan *managerial approach* yang akan dijelaskan pada bab 3.
- Bab 3, peneliti mulai menganalisis bagaimana peran UNDP-GEF sebagai organisasi internasional melalui proyek EPASS dalam mengatasi permasalahan di Taman Nasional Lore Lindu dengan menggunakan konsep implementasi organisasi internasional melalui pendekatan *managerial*.

membahas bagaimana pengelolaan (*managerial*) mulai dari melakukan kerja sama dan pengawasan melalui berbagai aktor, memberi bantuan teknis serta bantuan keuangan.

- Pada Bab 4 akan berisi kesimpulan mengenai bagaimana peranan UNDP-GEF sebagai organisasi internasional dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.



BAB 2

UNDP-GEF DAN *CONVENTIONAL ON BIOLOGICAL DIVERSITY* (CBD)

TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Pada bab 2 akan membahas UNDP-GEF yang terlibat membantu Indonesia untuk memenuhi komitmen internasional CBD ke-7. Secara spesifik bab ini menjelaskan tentang awal mula keterlibatan UNDP-GEF dalam menerapkan perannya sebagai organisasi internasional yang memiliki keahlian untuk membantu negara dalam memenuhi komitmen internasional Indonesia dalam *Conventional on Biological Diversity* (CBD). Pada bab ini proyek dukungan UNDP-GEF *for biodiversity conservation* yaitu EPASS mencoba untuk mengatasi permasalahan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di kawasan TNLL dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat agar terciptanya pengelolaan kawasan sesuai dengan komitmen internasional yang telah disetujui Indonesia.

2.1 UNDP-GEF dalam proyek EPASS

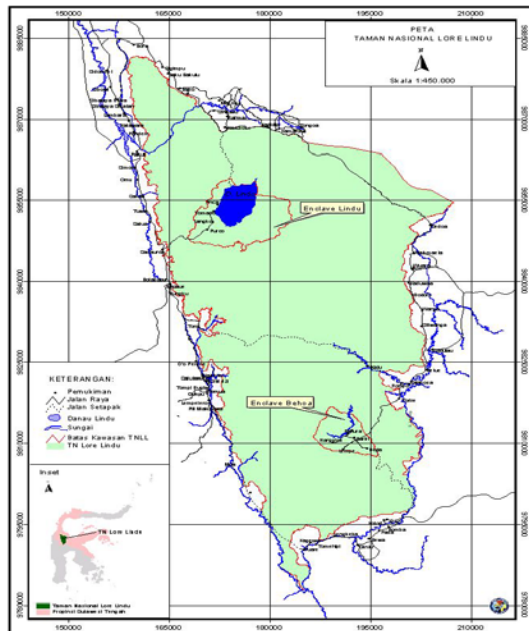
UNDP *for biodiversity conservation* menjadi salah satu hibah kelembagaan dari PBB yang membantu negara Indonesia untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam mematuhi *Conventional on Biological Diversity* (CBD), keterkaitan UNDP dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui proyek EPASS karena UNDP memiliki program keanekaragaman hayati dan ekosistem serta pengelolaan kawasan konservasi. Dalam hal ini, UNDP memiliki portofolio besar yang berisi proyek-proyek kawasan konservasi secara global dan di seluruh kawasan Asia yang diharapkan hasilnya memenuhi *Conventional on Biological Diversity*

(CBD) utamanya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi khususnya ditargetkan kepada masyarakat TNLL (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Global Environment Facility (GEF) yang merupakan institusi keuangan multilateral bidang lingkungan yang beroperasi dibawah koordinasi Bank Dunia, telah beroperasi sejak tahun 1991 untuk membantu proyek 3.251 di 165 negara telah mendonorkan dana hibah dengan jumlah US\$ 1,5 Miliar secara keseluruhan, dibentuknya GEF atas inisiatif dari Departemen Lingkungan Bank Dunia sebagai bentuk respon terhadap pembentuka mekanisme bantuan keuangan untuk rehabilitasi lingkungan di negara berkembang, permasalahan lingkungan yang dapat dibantu oleh GEF adalah perubahan iklim, keanekaragaman hayati, degradasi tanah, pengelolaan hutan, pencemaran kimiawi, air internasional, dan penipisan lapisan ozon dan dari 4 dokumen utama yang menjadi dasar pembentukan GEF salah satunya adalah *Conventional on Biological Diversity* (CBD) (UNDP, GEF - Enhancing Protected Area in Sulawesi (E-PASS) 2016) .

Dalam hal ini untuk menjaga keanekaragaman hayati menjadi salah satu prioritas tertinggi bagi UNDP-GEF, lebih dari 3000 proyek keanekaragaman hayati dari organisasi berbasis masyarakat dan organisasi non-pemerintah lokal telah didanai. UNDP juga melibatkan peranan masyarakat adat dan komunitas lokal secara penuh untuk membantu memenuhi upaya konvensi yang dilakukan oleh negara Indoensia (Dewi Sulastriningsih 2016).

Perlu diketahui bahwa masyarakat Taman Nasional Lore Lindu menjadi salah satu faktor agar terwujudnya pengelolaan yang baik dan mengurangi ancaman kawasan konservasi TNLL untuk pemenuhan *Convention on Biological Diversity* (CBD) mengenai peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, sebab masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan TNLL merupakan pemerhati paling penting terhadap kelestarian kawasan konservasi namun sayangnya tingkat kepedulian yang rendah serta keterbatasan masyarakat menimbulkan ketergantungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan.



Peta wilayah Taman Nasional Lore Lindu dan lokasi penelitian berada di desa Pakuli Utara dan desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Jarak tempuh lokasi penelitian :

- Kota Palu menuju desa Pakuli Utara berjarak kurang lebih 40 KM.
- Kota Palu menuju desa Simoro berjarak kurang lebih 54 KM.
- Garis panah hitam adalah desa Pakuli Utara.

Sumber: (EPASS 2020)

Mayoritas masyarakat yang hidup di sekitar TNLL berpenghidupan sebagai petani yang sejak awal mengolah sawah lahan basah dengan sistem menetap, namun di beberapa tempat masih terdapat beberapa sistem pertanian tebang dan bakar untuk

sawah kering. Namun demikian, mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah (Abraham Neil 2016) :

- Pertanian lahan basah
- Pertanian lahan kering (termasuk jagung, kedele, kacang tanah, pohon buah buahan, kopi, gula aren)
- Hewan ternak (ayam dan Ikan)
- Kerajinan tangan (produk-produk rotan, tikar, kain kulit kayu)
- Produk produk hutan (kayu dan rotan)
- Buruh musiman dan paruh waktu (buruh tani).

Sejak menurunnya kondisi perekonomian Indonesia dan rendahnya nilai tukar rupiah pada tahun 1998, terdapat peningkatan pertanian tanaman jangka menengah untuk perdagangan, khususnya kopi dan coklat mengandalkan sinar matahari langsung untuk produksi dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi TNLL. Pertambahan penduduk sebagai faktor utama degradasi batas TNLL. Kegiatan ilegal, terutama perburuan liar, pengambilan rotan, perburuan burung tidak hanya berdampak pada nilai keanekaragaman hayati TNLL, namun juga berdampak pada nilai nilai pariwisata. Meskipun transmigrasi formal di masa depan tidak lagi menjadi isu, migrasi informal perlu juga diperhatikan jika ingin pengelolaan TNLL berhasil.

Di sekitar kawasan konservasi sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat adalah usaha tani bahkan, keuntungan yang di dapatkan usahatani hanya dapat

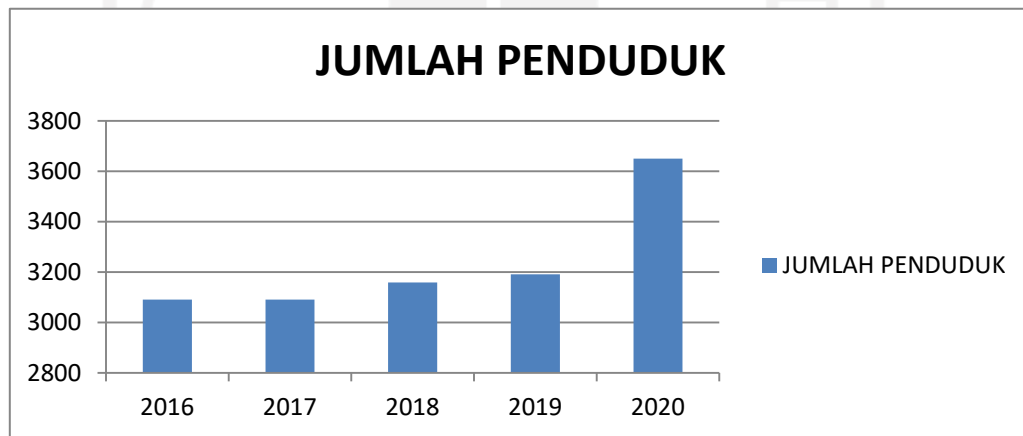
mencukupi kebutuhan sendiri karena pendapatan kelompok masyarakat ini cukup rendah (Abraham Neil 2016). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat banyak masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan konservasi bergantung pada sumberdaya hutan yang digunakan sebagai mata pencaharian mereka, sebagian besar juga menganggap bahwa hutan adalah sebuah warisan yaitu sumber daya penting yang dapat dikelola secara berkelanjutan sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Ketergantungan yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan sangat bergantung terhadap sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti kayu bakar, kayu untuk bahan bangunan, dan untuk sekedar mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kurangnya kawasan penyangga TNLL yang dikembangkan dan dikelola sangatlah memberi dampak buruk, karena kemungkinan besar semakin banyak sumber daya alam di kawasan konservasi hilang akibat masyarakat yang terus mencoba untuk memperluas pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta pembukaan lahan untuk pertanian, juga adanya perbaikan sistem jalan yang berlangsung terus-menerus dan lemahnya kontrol pengawasan sudah pasti akan memudahkan akses ke taman nasional dan akan lebih rawan meningkatkan ancaman (Zulkaidhah 2021).

Situasi di atas juga terjadi di Desa Pakuli Utara Utara dan Desa Simoro yang menjadi desa target penelitian. Kedua desa ini berbatasan langsung dengan taman nasional sehingga menjadikan masyarakat sangat bergantung dengan sumber daya hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup hari-hari, masyarakat desa ini yang merupakan usahatani namun hasil pertanian terkadang tidak memenuhi harapan mereka, terdapat pelanggaran-pelanggaran ditiap harinya seperti pemasangan jerat, penambangan liar, pengambilan secara ilegal rotan, palem dan hasil hutan lainnya. Pelanggaran tersebut tidak satupun ditindak lanjuti ke pihak berwajib, sehingga tidak adanya sanksi atau pembelajaran yang diberikan terhadap desa-desa yang melakukan pengambilan manfaat kawasan konservasi secara ilegal.

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Desa Simoro dan Pakuli Utara



Sumber : (Statistik 2020)

Tabel di atas, merupakan jumlah penduduk tersebut merupakan gabungan dari Desa Simoro dan Desa Pakuli Utara, di tahun 2016-2020 desa simoro memiliki jumlah penduduk 4.546 jiwa, dan penduduk di Desa Pakuli Utara 11.670 jiwa dengan jumlah kedua penduduk desa kurang lebih 16.216 jiwa. Tingginya peningkatan jumlah penduduk yang terus berkembang ditiap tahunnya membuat masyarakat sulit mencukupi kebutuhan hidupnya ditahun 2015 tercatat dalam (UNDP, United Nations

Development Programme Project Document 2015) pendapatan masyarakat desa berkisar Rp.250.000 sampai Rp.500.000.

Tabel 2.1 Sumber Mata Pencaharian Penduduk Desa Pakuli Utara dan Simoro

No.	Mata Pencaharian	Kesulitan Yang dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Pertanian Sawah	Kesulitan air, gangguan hama dan penyakit tanaman, gagal panen.	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu tanam yang tepat • Menggunakan bibit unggul. • Menggunakan pupuk, penyemprotan herbisida dan pestisida. • Pinjam dana pada tengkulak
2.	Pertanian Kebun (coklat, Kelapa, Palawija)	<ul style="list-style-type: none"> • Gagal Panen, serangan hama penyakit. • Harga rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan bibit unggul. • Menggunakan pupuk, penyemprotan herbisida dan pestisida. • Pinjam dana pada tengkulak
3.	Dagang (warung, kue)	<ul style="list-style-type: none"> • Harga barang cenderung naik • Daya beli masyarakat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli langsung pada agen distributor. • Konsinyasi barang. • Mencari barang yang bisa di jangkau oleh masyarakat.
4.	Pegawai Negeri Sipil	Penghasilan terbatas	Pinjaman pada lembaga keuangan

Sumber: (BP3D SIGI 2019)

Tabel 2 merupakan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pakuli Utara dan desa Simoro, pendapatan yang diperoleh masyarakat biasanya tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang,pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan) membuat masyarakat desa yang mayoritasnya bekerja

sebagai masyarakat tani tersebut memiliki aktivitas lain yaitu masuk ke kawasan hutan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu seperti rotan.

Beberapa hal yang menyulitkan masyarakat desa untuk keluar dari kebiasaan tersebut karena kurangnya lahan sebagai sumber penghasilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya inisiatif keterampilan dalam bertani, serta besarnya tanggungan keluarga yang membuat masyarakat memasuki wilayah Taman Nasional Lore Lindu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap bertahan hidup (Antara 2005).

Sehingga untuk memenuhi kepatuhan Indonesia terhadap peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan TNLL yang tercantum dalam *Conventional on Biological Diversity* (CBD) ke-7 tahun 2004 untuk dapat mengimplementasikan perjanjiannya sebagai bentuk kepatuhan Indonesia maka UNDP-GEF memberi bantuan proyek yaitu EPASS yang telah disetujui dalam pertemuan *Project Appraisal Committee* (PAC) sejak tahun 2014 (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

2.2 *Conventional on Biological Diversity* (CBD) Taman Nasional Lore Lindu

Indonesia menjadi negara yang menandatangani *Conventional on Biological Diversity* (CBD) mengenai peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, hal ini dilakukan agar keanekaragaman hayati dan ekosistem terjaga sehingga pemanfaatan sumber daya alamnya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Demi mencapai hal tersebut pemerintah Indonesia memasukan efektifitas pengelolaan

konservasi melalui *programme of work* CBD, dan dalam program kerja tersebut mengamanatkan kepada negara untuk melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap kawasan konservasi (Dewi Sulastriningsih 2016).

Secara resmi konvensi ini diresmikan dalam *UN Conference on Environment and Development* (UNCED) 5 Juni 1992, dan Indonesia telah menandatangani konvensi ini di tanggal tersebut sebagai penanda tangan ke-8 meratifikasi konvensi ini dengan UU No.5 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Dalam hal ini tujuan Indonesia menandatangani *Conventional on Biological Diversity* (CBD) mengingat kawasan taman nasional Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga tujuan dari konvensi ini untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Presinde RI (Republik Indonesia) 1994).

Keanekaragaman hayati memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan meningkatkan kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan hidup, dan tingkat keanekaragaman hayati yang baik mampu memajukan pembangunan berkelanjutan. Hilangnya keanekaragaman hayati memperburuk kemiskinan dan kemiskinan menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati, sehingga yang harus dilakukan adalah terciptanya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Mengenai pengelolaan kawasan TNLL di Indonesia dilakukan secara parsial dan tergantung sesuai dengan adanya aktivitas mitra kerja yang terlibat dalam pengelolaan, hingga mengakibatkan efektivitas pengelolaan kawasan TNLL tidak terdokumentasi dengan baik sebagai implementasi ratifikasi program kerja CBD (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Sehingga dalam upaya menjaga dan melestarikan Taman Nasional, pihak berwajib perlu melakukan pemberdayaan dan kerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan untuk sama-sama menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan memberdayakan masyarakat mereka akan ikut memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian hutan di sekitar mereka, masyarakat juga mampu mengontrol bagaimana kelangsungan hidup sumber daya alam yang ada di hutan. (Suprayitno 2018).

Taman nasional yang merupakan kawasan konservasi alam dengan ekosistem yang masih natural, dalam pengelolaannya menggunakan pendekatan zonasi berlandaskan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Zona Taman Nasional terdiri dari Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona lainnya (zona perlindungan bahari, zona tradisional, zona rehabilitas, zona religi, budaya dan sejarah, serta zona khusus. Zona Taman Nasional Lore Lindu merupakan upaya untuk menata kawasan ke dalam zona pengelolaan yang disesuaikan dengan peruntukannya dan pengendalian terhadap pemanfaatannya. Zonasi ini didasarkan melalui inventarisasi kawasan, pertimbangan prioritas

pengelolaan kawasan serta kondisi sosial ekonomi dan sekitarnya (KEHUTANAN 2015).

Sebelumnya dalam pemberdayaan masyarakat kawasan Taman Nasional Lore Lindu telah diupayakan kerjasama dengan *The Nature Conservancy* (TNC) yang membantu untuk mengembangkan model pengelolaan bersama berdasarkan kesepakatan konservasi masyarakat dukungan dari TNC mulai sejak 1992 namun penyusunan kesepakatan kawasan konservasi masyarakat terjadi sejak tahun 2003. Pada awal pelaksanaannya tahun 2004, pelaksanaan mencakup penetapan batas masyarakat dan taman nasional yang disepakati serta pelibatan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun hubungan antara masyarakat tidak dapat ditingkatkan, karena petugas Taman Nasional Lore Lindu yang dibekali dan dilatih untuk bekerja secara efektif berdasarkan dengan kesepakatan konservasi masyarakat tidak pernah dibina (White 2010) .

Kepentingan masyarakat desa terhadap kebun atau lahan yang mereka kelola sebelum adanya penetapan kawasan, membuktikan adanya ketergantungan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan konservasi demi mencukupi kebutuhan hidupnya mereka mengakibatkan perubahan akibat dari penggunaan lahan kebun campuran maupun dijadikan lahan pertanian. Hal ini akan terus dilakukan oleh masyarakat tersebut karena mereka kurang paham akan dampak yang akan terjadi seperti memburuknya perilaku fisik dan aliran air dalam tanah (Thaha 2001).

Masyarakat yang mempunyai lahan di dalam kawasan TNLL sering kali berkonflik dengan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu, masyarakat sangat mempertahankan kepentingan mereka dalam pemanfaatan lahan yang mereka miliki karena itulah sumber mata pencaharian mereka yang sudah lama mereka dapatkan secara turun temurun (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015) .

Pemanfaatan sumber daya hakikatnya diperbolehkan sebab hal tersebut juga merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat namun harus sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, apalagi sejak adanya surat keputusan dari Menteri Kehutanan 5 Oktober 1993 mengenai kawasan TNLL, dalam peraturan tersebut melarang masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam kawasan taman nasional, ditambah lagi dengan adanya aturan dari Pemerintahan Daerah Sulawesi Tengah surat keputusan Gubernur No.592/1993 didalamnya menyatakan keberadaan lahan adat yang berada dalam kawasan taman nasional tidak diakui secara sah (Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu 2020), dengan diberlakukan peraturan tersebut, membuat masyarakat semakin tidak nyaman karena kurangnya sumber mata pencaharian yang mereka miliki.

Tabel 2.2 Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup

No	Nomor Kebijakan	Isi Kebijakan	Tanggal Berlaku
1.	UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	10 Agustus 1990
2.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017	Perubahan atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang tata cara kerja sama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	22 Juni 2017
3.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017	Tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	22 Juni 2017
4.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.	2 Februari 2021

Berlandaskan peraturan dalam Tabel 3, Balai Taman Nasional Lore Lindu yang merupakan otoritas taman nasional dengan tugas mempertahankan kawasan

TNLL sebagai kawasan konservasi, dan bertanggung jawab atas perlindungan keanekaragaman hayati, sangatlah penting untuk mengajak masyarakat sekitar agar dapat mengurangi pemanfaatan sumber daya secara ilegal. Namun kurangnya pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan Taman Nasional antara pihak Balai Besar TNLL dan masyarakat sangat tidak setara, pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut sedangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sangatlah minim biasanya mereka hanya berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak Balai Taman Nasional karena masyarakat sekitar kawasan merasa penataan batas kawasan TNLL, adanya keterbatasan sarana dan prasana dalam pengelolaan TNLL yang sangat diperlukan untuk pemanfaatan wisata alam, jasa lingkungan, pendidikan dan juga kesadaran konservasi bagi peningkatan masyarakat (Saharia Kassa 2008).

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pada ketentuan umum pasal satu, menyatakan pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Kehutanan 2017).

Hal tersebut telah dilakukan upaya selama bertahun-tahun untuk menemukan solusi agar pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi dapat terwujud dengan dilakukan perjanjian pelaksanaan kesepakatan konservasi masyarakat. Dengan perjanjian tersebut dapat memungkinkan penduduk desa dan pemimpin TNLL menyepakati peran masing-masing dalam pengelolaan bersama, dalam kesepakatan tersebut mencakup penetapan batas masyarakat dan taman nasional yang disepakati serta adanya pelibatan masyarakat diharapkan dapat membantu mengurangi ancaman perambahan (Dr.Sudirman Dg Massiri November 2019).

Usaha tani konservasi yang telah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani juga sebagai tujuan melestarikan sumberdaya tanah dan air ini adalah sebuah paket teknologi usahatani yang penyerapannya belum dapat berjalan maksimal, karena modal yang diperlukan untuk investasi bangunan konservasi sangatlah besar, ditambah lagi kurangnya pengetahuan masyarakat karena tidak adanya tenaga penyuluh untuk menyampaikan informasi mengenai teknologi tersebut kepada masyarakat, sehingga membuat lemahnya kemampuan petani untuk menerapkan teknologi usahatani konservasi sesuai dengan apa yang diinstruksikan, dan terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung teknologi usahatani konservasi (Irmasari 2018).

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Taman Nasional Lore Lindu sejauh ini masih jauh dari kata maksimal karena terdapat kendala-kendala yang mana negara kita sendiri tidak mampu untuk

menanganinya, oleh sebab itulah peran UNDP-GEF dan dukungan proyek yang diberikan sangat diharapkan dapat memberi manfaat bagi Indonesia.

Taman Nasional Lore Lindu menjadi salah satu kawasan yang dipilih UNDP-GEF karena nilai keanekaragaman hayati yang dimiliki sangat tinggi, namun dinilai dari sudut pandang internasional untuk pengelolaannya masih belum memadai. Maka komponen utama agar TNLL dapat terkelola dengan baik yaitu adanya upaya pemberdayaan masyarakat sekitar TNLL yang dijalankan melalui proyek EPASS, pemberdayaan ini dimaksud agar terciptanya manfaat bagi masyarakat kawasan TNLL dan juga meningkatkan kesejahteraan secara lestari dengan penerapan *micro-grant mechanism* yang akan mendukung pendirian dan pengembangan usaha kecil masyarakat berbasis lingkungan. Seperti, peternakan lebah, rumah produksi kerajinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan penanaman kakao skala kecil. (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia maka melalui proyek EPASS dengan pendekatan *managerial* dengan dilakukan dalam 4 tahapan terhadap implementasi perjanjian internasional yang diberikan oleh UNDP-GEF menghasilkan keberhasilan mengenai terciptanya pengelolaan secara baik dan efektif sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam *Conventional on Biological Diversity* (CBD).

BAB 3

IMPLEMENTASI PROGRAM *MANAGERIAL APPROACH* DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Bab 3 akan membahas bagaimana implementasi *Conventional on Biological Diversity* (CBD) negara Indonesia melalui peran UNDP-GEF dalam proyek EPASS terhadap pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu agar pengelolaan bersama terhadap kawasan konservasi TNLL dapat dikelola sesuai dengan komitmen internasional Indonesia. Peneliti menemukan bahwa konsep implementasi organisasi internasional melalui pendekatan *managerial* yang bersifat terbuka dan dapat dikelola merupakan pendekatan yang cukup relevan, hal ini akan dilihat melalui bagaimana UNDP-GEF berperan sesuai dengan nilai dan komponen yang ada dalam pendekatan *managerial*. Sehingga, pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran UNDP-GEF sebagai organisasi internasional melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui proyek EPASS dengan variabel *managerial* yang berpusat pada pengelolaan bersifat transparan, menjalin kerja sama dengan berbagai aktor, melakukan pengawasan serta memberikan bantuan teknis dan keuangan pada saat proyek ini berlangsung.

3.1 Memberikan Bantuan Teknis dan Keuangan

Untuk mencapai tujuan dalam penerapan *Conventional on Biological Diversity* (CBD), UNDP-GEF melalui pendekatan *managerial* membantu negara dengan bantuan teknis dan keuangan dalam mengambil langkah yang diperlukan sebagai jalan tengah agar perjanjian internasional tersebut dapat terpenuhi. Dalam

hal ini, terdapat dua kelompok Unit Pengelola Teknis (UPT) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) yang bertanggung jawab mengelola satu wilayah kawasan konservasi yaitu TNLL dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Selama pelaksanaan proyek EPASS, UNDP-GEF memberikan bantuan berupa dana hibah dan juga bantuan teknis (Afianto 2022). Hal ini dilakukan guna mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu sesuai dengan tujuan dari EPASS yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan melalui penyadartahuan konservasi dengan memberikan akses kelola kawasan, akses kelola lembaga, dan akses kelola usaha.

Bantuan dana *small grant* yang diberikan UNDP-GEF disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masing-masing desa, pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bersama tim *Project Implementing Unit* selaku tim EPASS melakukan kunjungan desa yang berada di kawasan TNLL sebagai bentuk memfasilitasi masyarakat, guna menggali potensi masyarakat melihat apa saja peluang yang dimiliki masing-masing desa kemudian merumuskan kebutuhan kelompok. Bantuan dana yang telah diberikan oleh UNDP-GEF digunakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dengan prinsip tetap menjaga kelestarian Taman Nasional Lore Lindu (Cesar 2022).

Zarlif, selaku tenaga ahli pengembangan masyarakat BBTNL, mengatakan bahwa Proyek EPASS memberikan sumbangsih berupa dukungan teknis kepada masyarakat dengan membentuk lembaga lokal yakni Lembaga Pengelola Konservasi

Desa (LPKD) untuk menyusun rencana-rencana kegiatan (Zarlif 2022). Kemudian, diberikan pendampingan peningkatan kapasitas kepada LPKD dalam menyusun proposal kegiatan, dan diberikan sumbangsih berupa dana hibah agar rencana kerja yang sudah tersusun dalam proposal tersebut dapat direalisasikan.

Dengan adanya bantuan yang diberikan, Zarlif mengamati Desa Pakuli Utara LPKD sudah melakukan kegiatan pengembangan wisata alam air panas dan penangkaran Burung Maleo, selain itu juga dilakukan pengawasan untuk menjaga dan melestarikan habitat Maleo yang sangat berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat (Zarlif 2022). Sedangkan Desa Simoro, selain dilakukan kegiatan konservasi juga membuat hutan pendidikan di desa serta rumah produksi bagi kaum perempuan sebagai kegiatan produktif dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Guna memastikan hal ini, penulis memperoleh data dari LPKD Pakuli Utara dan LPKD Simoro. Di Pakuli Utara Azir sebagai ketua LPKD menyatakan Adanya dukungan dana yang diberikan oleh EPASS sebesar Rp.149.998.000, tiap LPKD. namun sebelum mendapatkan dana tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh LPKD yaitu penggalan informasi untuk pembuatan proposal, lalu membuat Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan program untuk diajukan sebagai pembiayaan yang diberikan oleh EPASS, dan anggaran tersebut langsung ditransfer ke rekening LPKD, untuk pengambilan anggaran harus dilakukan secara bertahap.

Pertama, dilakukan pengambilan sebanyak 50% dengan acuan program RAB, tahap kedua 30% dan tahap ketiga 20% (Azir 2022).

Selain bantuan dana, adanya peningkatan kapasitas anggota, seperti dilakukan pelatihan dan disediakan fasilitator oleh EPASS kepada kelompok-kelompok masyarakat sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan. Tenaga yang telah diutus oleh UNDP menjadi pendamping untuk LPKD berperan sebagai pembimbing anggota kelompok dengan pengetahuan yang dimiliki, kemudian sebagai penyambung komunikasi kepada pihak manager EPASS agar memudahkan pelaksanaan kegiatan program.

Di Desa Simoro Ilham juga menjabarkan apa saja bantuan yang diberikan oleh UNDP-GEF melalui proyek EPASS, bantuan dana yang diberikan proyek EPASS kepada LPKD, dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa, LPKD bersama Balai Besar TNLL mengenai penurunan dana harus dilaksanakan pembuatan proposal. Proposal tersebut berisi Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah itu pengambilan dana akan dilakukan melalui tiga kali tahapan pencairan dana, lalu pihak LPKD bersama tim pendamping membuat laporan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan yang sudah tertuang dalam proposal dan dilakukan rapat evaluasi anggaran di tingkat kelompok guna menyesuaikan apakah dana terpakai sesuai dengan rincian anggaran yang ada dalam proposal, jika tidak ada kendala dalam laporan pertanggungjawaban maka proses penurunan dana tahap selanjutnya akan diterima oleh LPKD (Ilham 2022).

Selain bantuan dana, proyek EPASS juga memberikan bantuan berupa teknis yaitu mengirim tim fasilitator pendamping desa untuk membimbing LPKD desa dan kelompok-kelompok usaha desa Simoro selama masa proyek ini berlangsung. Pendamping ini juga berperan sebagai penyambung lidah atau penerus informasi guna memudahkan tim LPKD yang berada di lapangan berkoordinasi bersama pihak manajer EPASS.

Bantuan yang diberikan juga terlihat melalui upaya yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat, Zarlif mengambil langkah yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas masyarakat di Kawasan TNLL yaitu dengan merangkul masyarakat agar bisa mengenal dan memahami bagaimana proyek EPASS dilaksanakan dengan upaya menentukan tujuan agar masyarakat bisa memahami bagaimana pengelolaan kawasan Lore Lindu dan juga dengan adanya dukungan dana hibah yang diberikan oleh UNDP-GEF diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, hal yang menjadi pencapaian utama sebagai pengembangan masyarakat adalah bagaimana dapat terwujud pengelolaan bersama antara Balai Besar TNLL dan masyarakat sekitar hutan (Zarlif 2022).

Desa Pakuli Utara dan Desa Simoro upaya yang dilakukan berawal dari proses sosialisasi, mulai dari pemerintah desa dan masyarakat untuk mengenal dan memahami proyek agar tujuan dari proyek dapat tercapai, upaya yang dilakukan setelah sosialisasi adalah terciptanya kesepakatan konservasi masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) hal ini juga dilakukan bersama Balai Taman Nasional Lore Lindu. Perjanjian Kerja Sama ini menjadi landasan agar

pemerintah desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa mendapat hak atau akses kelola dari pemerintah terhadap kawasan TNLL, dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat berada di kawasan zona tradisional.

Melalui pemberian bantuan dana dan bantuan teknis, di Desa Pakuli Utara telah merealisasikan program Sanctuary Maleo dengan melanjutkan pelaksanaan penangkaran burung Maleo yang sudah terlaksana oleh yayasan Jambata tahun 2006-2007 namun kegiatan yang dilakukan pada tahun tersebut berhenti karena terhambat dengan jembatan putus hingga menyulitkan akses ke tempat penangkaran. Sehingga, dengan adanya proyek EPASS yang dilaksanakan di desa Pakuli maka anggota LPKD menginisiasi kegiatan penangkaran burung Maleo dilaksanakan kembali. Selain itu, dilakukan pembibitan pohon Pakan Maleo yang difokuskan ada pohon kemiri, LPKD Singgani juga membuat pos jaga untuk mengawasi siapa saja yang masuk ke kawasan/habitat burung Maleo, dari anggaran tersebut juga menghasilkan 2 kandang penangkaran untuk burung Maleo dan penanaman telur masing-masing berukuran 4x6. (Azir 2022).

Sedangkan di Desa Simoro, Ilham mengungkapkan terkait dana yang sudah diberikan, LPKD Simoro berinisiasi untuk melanjutkan usaha kelompok ibu-ibu dalam pembuatan keripik tortilla, dan pembuatan instan jahe dan kunyit asam yang sebelumnya sempat terhenti karena fasilitas yang terbatas (Ilham 2022). Proyek EPASS juga menyediakan rumah produksi yang di dalamnya sudah tersedia alat-alat pendukung usaha keripik tortilla, instan jahe dan kunyit asam. Adanya tim teknis

EPASS dan tim fasilitator desa yang sudah dibentuk oleh EPASS berkontribusi untuk membantu LPKD dalam pengelolaan dana yang telah diberikan.

Kepala Desa Simoro, Nasri mengakui bantuan yang diberikan UNDP-GEF melalui proyek EPASS sangat membantu masyarakat untuk memberikan pemahaman pentingnya menjaga kawasan Taman Nasional Lore Lindu, dengan adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah desa dan Balai Besar TNLL khususnya rencana pelaksanaan program selama 5 tahun, dan terbentuknya Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa untuk mengayomi masyarakat agar tetap menjaga kelestarian kawasan serta dibantu dengan kegiatan-kegiatan untuk menambah penghasilan dari masyarakat setempat (Nasri 2022). Kemudian, ia juga mengatakan bahwa proyek EPASS ini sangat memberi banyak bantuan kepada Desa Simoro ia sebagai kepala desa berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Tim Balai Besar TNLL dan UNDP turun langsung memberikan bantuan dan penyediaan alat-alat di rumah produksi guna melancarkan usaha keripik tortilla yang sebelumnya dikerjakan dengan manual, segala bentuk bantuan yang diberikan melalui proyek EPASS sangat berguna dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Simoro.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan adanya bantuan teknis yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Masyarakat, (Zarlif 2022) mengambil langkah pertama dengan merangkul masyarakat agar bisa mengenal dan memahami bagaimana proyek EPASS dilaksanakan dengan upaya menentukan tujuan agar masyarakat bisa memahami bagaimana pengelolaan kawasan Lore Lindu dan juga dengan adanya dukungan dana hibah yang diberikan oleh

UNDP-GEF diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. hal yang menjadi pencapaian utama sebagai pengembangan masyarakat adalah bagaimana dapat terwujud pengelolaan bersama antara Balai Besar TNLL dan masyarakat sekitar hutan.

Desa Pakuli Utara dan desa Simoro upaya yang dilakukan berawal dari proses sosialisasi, mulai dari pemerintah desa dan masyarakat untuk mengenal dan memahami proyek agar tujuan dari proyek dapat tercapai, upaya yang dilakukan setelah sosialisasi adalah terciptanya kesepakatan konservasi masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) hal ini juga dilakukan bersama Balai Taman Nasional Lore Lindu. Perjanjian Kerja Sama ini menjadi landasan agar pemerintah desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa mendapat hak atau akses kelola dari pemerintah terhadap kawasan TNLL, dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat berada di kawasan zona tradisional.

3.2 Melakukan pengawasan melalui berbagai aktor

Hadirnya *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan monitoring dan difokuskan untuk menilai kawasan konservasi daratan, METT menjadi salah satu perangkat universal yang telah digunakan kurang lebih dari 100 negara pada ribuan kawasan konservasi dan perangkat ini dikembangkan oleh World Wide Fund (WWF) dan GEF guna memantau perkembangan proyek yang dijalankan (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Kelembagaan GEF sudah diatur dalam *tripartie agreement* yang mengintegritaskan Bank Dunia, *United Nations Environment Agencies* (UNEP) sebagai *implementing agencies*, dalam hal ini merekalah yang bertanggungjawab dalam hal strategi keuangan, persiapan dan efisiensi biaya proyek, dan implementasi kebijakan serta penasehat operasional. Kemudian UNDP sendiri bertanggungjawab sebagai koordinator dan juga sebagai *Project Manager* dalam proyek ini.

Indonesia melalui proyek EPASS dalam mematuhi komitmen internasionalnya terkait *Convention on Biological Diversity* (CBD) dilakukan monitoring berada di tingkat pusat dan lapangan, hal ini dapat terlihat dari adanya laporan kegiatan dan pengawasan lainnya juga terlihat dari kedatangan perwakilan langsung dari UNDP dan METT ke Indonesia untuk memastikan dan mengawasi upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan melalui kegiatan EPASS terlaksana dengan baik (Adi Widiyanto 2015).

UNDP melalui proyek EPASS dalam melakukan pengawasan melalui beberapa *monitoring and evaluation tools* (Afianto 2022). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) baik ditingkat nasional di kantor *Project Management Unit* ataupun ditingkat lapangan *Project Implementing Unit*, hal ini dilakukan guna mengantisipasi agar tidak terjadinya penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan, dan dari sisi teknis adanya tim yang memonitoring kegiatan turun langsung ke masyarakat dengan tujuan mengetahui bagaimana proyek berdampak bagi masyarakat desa baik itu menimbulkan manfaat ataupun menimbulkan keluhan dan informasi yang

didapatkan ini tidak melalui pihak lain melainkan langsung dari tim yang turun langsung di lapangan.

Pada intinya ada 2 *monitoring* dari sisi keuangan dan dari sisi teknis. Adanya pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat lapangan untuk melakukan *monitoring* pelaksanaan *annual work plan* atau rencana kerja satu tahun yang disusun secara bersama-sama dengan KLHK dan Balai Besar TNLL, secara rutin dilakukan 1 atau 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan pelaksanaan.

Cesar sebagai Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawasan BBTNL, mengatakan pengawasan dilakukan dengan mengadakan *monitoring and evaluation meeting* rutin dilaksanakan setiap bulan baik kegiatan ditingkat lapangan maupun ditingkat pusat (Cesar 2022). Kemudian merekrut tenaga pendamping guna mengawasi dan mendampingi kegiatan EPASS di lapangan. Setiap dana yang telah dicairkan kepada LPKD selama masa penggunaannya akan dituangkan kedalam laporan pertanggungjawaban, dan akan diverifikasi oleh pendamping desa, tim *project implementing unit* lalu diketahui oleh Kepala Balai Besar TNLL, kemudian kembali diverifikasi oleh proyek manager EPASS pusat.

UNDP-GEF melakukan pengawasan dengan melibatkan tim *project management unit* dan *project implementing unit*, serta juga merekrut tim pendamping serta fasilitator desa guna membimbing kelompok usaha masyarakat dan mengawasi kegiatan yang berjalan di lapangan. Tidak hanya itu, pemerintah desa Simoro dan Pakuli Utara juga ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan proyek yang berjalan di desa tersebut.

Keterlibatan pemerintah desa guna memantau dan mengawasi masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan. Serta dilakukan pengawasan dalam rumah produksi (kelompok usaha keripik tortilla) yang didanai oleh UNDP. Dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa melakukan koordinasi kepada LPKD dan kelompok usaha serta tenaga pendamping guna melihat bagaimana perkembangan yang terjadi selama masa proyek ini berlangsung, dan memastikan agar bantuan yang diberikan oleh UNDP berjalan dengan baik.

Pembentukan Lembaga Pengelola Konservasi Desa juga merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan proyek di lapangan, sebab kehadiran LPKD membantu terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Selama masa jabatannya Azir sebagai ketua LPKD mengatakan bahwa sebelum adanya proyek EPASS, aktivitas masyarakat yang masuk ke kawasan habitat tak terbendung seperti mengambil pengambilan telur, ditambah lagi adanya perkebunan masyarakat di sekitar kawasan habitat. Tetapi dengan adanya LPKD memberikan pemahaman terkait hutan, satwa, sehingga masyarakat mulai membatasi diri untuk masuk ke kawasan habitat (Azir 2022).

Tidak hanya itu, hal yang sama juga terjadi di Desa Simoro, Ilham sebagai ketua LPKD desa Simoro sekaligus menjabat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) mengakui, sebelum adanya proyek EPASS masyarakat desa Simoro memiliki 150 hektare perkebunan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, namun hal tersebut dapat diatasi dengan memasukan lahan tersebut ke dalam zona tradisional oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, pemerintah

desa, dan LPKD. Ilham juga mengatakan, proyek EPASS dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simoro sangat memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat setempat, lapangan kerja kelompok usaha yang tercipta perlahan semakin luas, aktivitas masyarakat dalam kawasan yang tidak memiliki hak kelola juga tidak lagi terjadi (Ilham 2022).

Selama pelaksanaan proyek tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hambatan seperti adanya pengelolaan masyarakat yang sudah terlanjur melakukan aktivitas seperti berkebun di dalam kawasan TNLL tidak bisa langsung menerima kegiatan Proyek EPASS karena masyarakat setempat mencurigai bahwa akan kehilangan tempat tinggal dan perkebunan yang mereka miliki dalam kawasan TNLL akan dimusnahkan. Namun, sebenarnya dengan adanya program ini bagi masyarakat terlanjur memiliki perkebunan dalam kawasan akan dimasukkan ke kawasan Zona Tradisional dengan syarat yaitu tidak dapat memperluas tanah dan harus menjaga area sesungguhnya dengan memperkaya tanaman kayu-kayuan agar fungsi konservasi tetap berlangsung (Zarlif 2022).

Terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami 28 September 2018 juga menjadi salah satu hambatan, banyaknya rumah masyarakat Desa Simoro dan Pakuli Utara mengalami kerusakan berat karena wilayah yang berada di sekitar Taman Nasional Lore Lindu merupakan wilayah patahan Palu Koro aktif. Dengan kejadian tersebut, banyak terjadi kerusakan fisik seperti rumah warga sehingga kecocokan waktu pada saat ingin melakukan kegiatan bersama masyarakat desa dan LPKD sulit ditemukan. Tidak hanya itu, akibat terjadinya tsunami akses transportasi menjadi sulit

dan terjadi perubahan harga bangunan yang sudah tersusun sebelumnya dalam proposal sehingga itu menjadi sebuah tantangan untuk harus disesuaikan kembali. Lalu, 2019-2020 terjadinya Covid-19 hingga membuat sulit terlaksananya kegiatan bersama masyarakat sebab adanya pembatasan pertemuan bersama masyarakat setempat.

Hal serupa juga dikatakan oleh Nasri, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini pada tahun 2018 karena terjadinya bencana alam sehingga semua aktivitas terhambat dan saat melakukan koordinasi cukup sulit kepada kelompok masyarakat, kemudian pada tahun 2020 terjadi Covid-19 yang mengeluarkan kebijakan baru yaitu adanya pembatasan pertemuan antar masyarakat hingga cukup sulit untuk melakukan kegiatan usaha tersebut (Nasri 2022).

Namun, Zarlif mengakui bahwa hambatan serta tantangan tersebut dapat teratasi karena koordinasi yang baik terus dilakukan antara tim pengembangan masyarakat bersama pihak Balai Besar TNLL, pemerintah desa beserta Lembaga Pengelola Konservasi Desa (Zarlif 2022). Dengan adanya kelembagaan formal di tingkat desa sangat membantu mengatasi hambatan yang ditemui di Lapangan, aktivitas yang dilakukan di Lapangan juga terbantu karena adanya tenaga pendamping desa yang berdomisili asli di desa tersebut telah direkrut untuk membantu rutinitas kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan dalam pengawasan serta selama proyek EPASS berjalan, Afianto sebagai perwakilan UNDP Indonesia mengatakan bahwa tidak ada hambatan yang terjadi, koordinasi antara pihak Balai dan tim PMU berjalan sesuai dengan

prosedur yang ada dan *monitoring visit* yang dilakukan juga berjalan dengan lancar (Afianto 2022).

Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu salah satunya adalah melakukan pengawasan dalam berbagai aktor yang merupakan bagian dari komponen dalam konsep implementasi organisasi internasional untuk melaksanakan perjanjian kerja sama seperti yang dijalani oleh UNDP-GEF dan KLHK melalui proyek EPASS.

Pengawasan dilakukan guna melindungi agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, dengan melihat pernyataan diatas terjadinya kendala selama pelaksanaan proyek dapat teratasi sebab terjalinnya koordinasi yang baik antara tim UNDP-GEF, tim *Project Manager Unit*, dan tim *Project Implementing Unit* yang dilakukan dengan *monitoring visit* dan *evaluation tools*.

3.3 Melakukan Kerja Sama dengan Berbagai Aktor

UNDP dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu menjalin kerja sama dengan aktor nasional dan internasional. Kerja sama UNDP yang dilakukan merupakan salah satu bagian dalam penerapan nilai pendekatan *managerial* bersifat terbuka dan dapat dikelola. Inilah yang menjadikan peran UNDP dalam menerapkan nilai-nilai yang dimiliki dapat berjalan efektif karena para aktor yang terlibat sudah pasti memiliki keahlian tiap bidangnya.

UNDP mempunyai jalinan kerja sama dengan mitra proyek yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memiliki keahlian dari sisi teknis, misalnya bagaimana mendampingi masyarakat untuk membentuk kelompok patroli hutan. Hal ini dapat dilakukan bersama NGO lokal maupun NGO nasional, dan NGO yang terlibat harus mempunyai perjanjian kerja sama yang jelas dengan pihak KLHK, setelah mendapat keputusan dari KLHK barulah NGO tersebut berhubungan langsung dengan pihak Balai Besar TNLL. Proyek EPASS ini mempunyai *implementing partner* ada 2 dari KLHK dan juga BAPPENAS (Afianto 2022) keterlibatan kedua pihak ini terkait regulasi kebijakan untuk penerapan proyek ranah domestik.

Dalam hal ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mempunyai tanggung jawab mengenai kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan satwa liar dan pengelolaan hutan. KLHK mempunyai peranan penting dalam proyek EPASS karena KLHK merupakan pelaksana utama proyek pada tingkat nasional maupun daerah melalui dinas kehutanan, serta penerima manfaat utama untuk pembangunan kapasitas, selaras dengan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup bahwa lembaga pemerintah tingkat nasional tersebut memiliki tanggung jawab mengelola lingkungan hidup dan sebagai tempat berkantornya sekretariat GEF nasional.

Dalam pelaksanaan proyek ini UNDP membentuk *Project Implementing Unit* (PIU) Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab mengelola taman nasional. Balai Besar TNLL sangat penting dalam pelaksanaan proyek karena

menjadi pelaksana utama kegiatan di kawasan pada tingkat provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan proyek EPASS, UNDP merekrut Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat merupakan bagian dari PIU. BBTNL yang merupakan *project implementing unit* kemudian bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Sigi dan pemerintah kabupaten Poso melalui operasi perangkat daerah. Beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan proyek berupa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) , Dinas Parawisata dan Kebudayaan, Dinas Industri dan Perdagangan, serta Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Kerja sama yang dilakukan melalui operasi perangkat daerah sebelumnya sudah menjadi upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNLL yang dilakukan oleh Balai Besar TNLL, kehadiran UNDP-GEF melalui proyek EPASS membantu pemerintah kabupaten Sigi dan Poso dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNLL melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Besar TNLL dengan pemerintah desa Simoro dan Pakuli Utara. Adanya PKS tersebut membantu masyarakat untuk mendapatkan akses kelola dalam memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk menambah usaha ekonomi masyarakat dan ini merupakan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sekitar kawasan.

Sedangkan BAPPENASS yang merupakan lembaga pemerintah tingkat nasional yang bertanggung jawab atas perencanaan ekonomi dan pembangunan nasional sekaligus menyusun strategi dan kebijakan dalam menetapkan alokasi keuangan pada berbagai sektor perekonomian nasional (UNDP, United Nations Development Programme Project Document 2015).

Keterkaitan UNDP dan *Global Environment Facility* (GEF) dalam proyek EPASS yaitu mengenai dana yang diberikan oleh GEF, biasanya setiap beberapa tahun GEF membuka kesempatan terkait tema-tema tertentu untuk *executing agency* seperti UNDP. Jadi untuk mendapatkan dana dari GEF, UNDP mengajukan proposal terlebih dahulu ke GEF lalu proposal tersebut akan disetujui jika memenuhi persyaratan, dan sesuai dengan tema dari GEF, jika sudah disetujui dana akan diberikan kepada UNDP. Dalam pembuatan proposal untuk mendapatkan dana dari GEF, UNDP melakukan riset data terlebih dahulu dengan melihat lokasi mana saja yang mendapat tekanan besar terhadap konservasi (Afianto 2022).

Dalam pengimplementasian nilai dan mewujudkan misinya sebagai organisasi internasional, dengan adanya bantuan dana oleh GEF kepada UNDP sangat membantu upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Terbukti dengan terbukanya peluang masyarakat dalam mendapatkan mata pencaharian alternatif seperti menjalankan usaha-usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), penyediaan rumah produksi untuk kelompok usaha perempuan, serta perlindungan terhadap satwa endemik di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

3.4 Membantu Negara dalam Mengembangkan Kapasitasnya

Afianto sebagai perwakilan UNDP Indonesia mengatakan bantuan yang diberikan oleh UNDP berupa teknis dan keuangan, pertama dari *capacity building* dibantu dengan *training* sesuai dengan masing-masing desa. Namun sebelum itu dilaksanakan *workshop* untuk mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok tersebut

sesuai dengan potensi masing-masing desa, lalu dilatih untuk membuat proposal mengenai potensi yang dimiliki kelompok masyarakat, selain itu adanya bantuan untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kelompok masyarakat tersebut dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sampai PKS tersebut disetujui oleh pihak Balai (Afianto 2022). Melalui tim yang mendampingi di lapangan, pihak UNDP membantu secara keuangan agar pelatihan berjalan dengan lancar dan juga biasanya mengundang narasumber dari tempat lain yang berpengalaman.

Pengadaan proyek EPASS oleh UNDP-GEF memberi manfaat terutama bagi aktor negara yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Hal tersebut dikatakan oleh Cesar mengenai manfaat yang dirasakan terutama bagi Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan menerima kegiatan berupa monitoring analisis guna mengetahui bagaimana menjaga kondisi kawasan, melestarikan flora dan fauna, BBTNL menerima bantuan kegiatan survei untuk meningkatkan kapasitas sistemik dan kelembagaan untuk perencanaan dan pengelolaan sistem kawasan konservasi dengan cakupan pelaksanaan *Resort Based Management* (RBM), (Cesar 2022).

Lebih lanjut Zarlif mengatakan bahwa Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dibantu untuk meningkatkan kemampuan efektif untuk menilai kinerja *resort* dengan membentuk sistem evaluasi dan pelaporan atau koordinasi yang efektif. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti *training RBM*, *training monitoring biodiversitas*, *training smart patrol*, *training pemasangan camera trap*, *training pengambilan sample data tutupan lahan*, dan penyegaran polisi hutan (Zarlif 2022).

Kegiatan yang diterima seperti *training* RBM berguna agar data temuan di kawasan dapat terdata dan terdokumentasi dengan cepat, periodik, teratur dan sistematis agar dapat ditindak lanjuti lebih efektif dan efisien, yang kemudian berupah menjadi *training smart patrol* yang dilaksanakan untuk melatih Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai Besar TNLL dalam implementasi *spatial monitoring and reporting tool* serta standar patroli yang dapat mendukung dalam monitoring satwa, identifikasi tanaman seperti perburuan ilegal, penguasaan lahan tanpa izin dan pengambilan hasil hutan bukan kayu, dan resort tersebut menjadi unit terkecil penyedia data dan informasi di Taman Nasional Lore Lindu .

Sejalan dengan hal ini, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pengelolaan taman nasional melalui peningkatan pemahaman tentang konservasi sumber daya alam, UNDP juga menyediakan tools monitoring untuk menjaga kesehatan hutan dan juga menyediakan tenaga untuk melatih para *resort* dan pelatihan tersebut diikuti oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (Zarlif 2022).

UNDP-GEF melatih BBTNL secara teknis untuk mempersiapkan rencana keuangan taman nasional agar mendapat pendanaan yang tidak hanya dari pemerintah pusat akan tetapi dibantu untuk melihat mencari kesempatan atau peluang mendapatkan anggaran diluar APBN, UNDP-GEF mengharapakan dengan adanya proyek ini aktor yang terlibat memiliki peningkatan kualitas (Afianto 2022).

Dalam membantu negara mengembangkan kapasitasnya, pendekatan *managerial* memiliki sifat yang terbuka dan dapat dikelola sehingga untuk penerapan nilai yang dimilikinya dapat dijalankan sesuai dengan terjalannya hubungan antara pihak terkait.

Hal ini disampaikan oleh Afianto (2022), UNDP sebagai *executing agency* atau pelaksana yang bekerja sama dengan KLHK, yang mana KLHK merupakan *implementing partner* yang mendampingi UNDP dalam pelaksanaan proyek EPASS yang merupakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH). UNDP mengelola proyek ini secara terbuka dan dapat dikelola yaitu dengan menargetkan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kawasan sekitar taman nasional, untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang berkeadilan, terbuka, dan partisipatif maka UNDP mendekati desa-desa yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

UNDP melakukan hal tersebut dengan pendekatan *Community Conservation Agreement* yaitu pembentukan kelompok, membangun kepedulian masyarakat terhadap kawasan, dan bagaimana agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan secara langsung dengan menyusun proposal sesuai dengan peluang yang ada di masing-masing desa, proposal tersebut berisi rencana kerja, berapa jumlah anggota di dalamnya, dan apa saja kebutuhannya. Melalui proposal tersebut UNDP menyerahkan dana untuk dipakai oleh Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD). Proposal tersebut diseleksi dan dibantu oleh tim UNDP yaitu *Project Manajemen Unit* (PMU) dan *Project Implementing Unit* (PIU) terkait

penyusunan proposal, penulisan proposal hingga kelompok tersebut dapat menjalankan dengan baik (Afianto 2022).

Berdasarkan hasil survei dan wawancara bahwa pendekatan *managerial* penulis menganalisis bagaimana peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam pendekatan *managerial*, yaitu bersifat transparan, terbuka dan dapat dikelola, melakukan kerja sama dengan mitra lain, melakukan pengawasan dan memberikan bantuan teknis dan keuangan serta mengembangkan kapasitas negara. Perspektif *managerial* menurut Jutta Joachim (2008) kepatuhan terhadap perjanjian internasional akan terjadi selama adanya interaksi yang baik agar menciptakan keuntungan bersama antar aktor terkait. Pada intinya, melalui persetujuan antar pihak terlibat dalam perjanjian yang dijalani mendapat keuntungan merata.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki ekosistem asli serta kekayaan keanekaragaman hayati endemik baik flora, maupun fauna sebagai penyangga kehidupan, sehingga kawasan tersebut harus dijaga dan dilindungi.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dapat menjadi ancaman akan kelestarian TNLL bila tidak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan sehingga masyarakat mampu melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan harus dilaksanakan oleh pihak pengelolaan kawasan yaitu Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, pelibatan pihak internasional dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan perlu dilakukan agar upaya pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

Tingginya aktivitas masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besar tekanan dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu terancam.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi merupakan usaha tani, pendapatan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat usaha tani tergolong rendah sehingga masyarakat sekitar kawasan bergantung pada sumberdaya hutan.

Besarnya ancaman kelestarian TNLL menjadi perhatian UNDP-GEF untuk mencari cara agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan tetap menguntungkan masyarakat yang berada di kawasan TNLL. Komponen utama agar TNLL dapat dikelola dengan baik yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui proyek EPASS. Pemberdayaan ini dimaksud agar terciptanya manfaat bagi masyarakat kawasan TNLL dan juga meningkatkan kesejahteraan secara lestari dengan penerapan *microgrant mechanism* yang akan mendukung pendirian dan pengembangan usaha kecil masyarakat berbasis lingkungan. Seperti, peternakan lebah, rumah produksi kerajinan hasil hutan bukan kayu, *sanctuary* maleo, dan mendapat keuntungan dari pengembangan ekowisata.

Melihat latar belakang di atas penulis mengungkapkan pertanyaan penelitian berupa, bagaimana peran UNDP-GEF melalui proyek EPASS dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu tahun 2016-2020.

Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis menemukan melalui pendekatan *managerial* menjadi salah satu pendekatan yang relevan agar upaya pemberdayaan masyarakat ini berjalan dengan baik, UNDP-GEF melalui proyek EPASS bekerja sama dengan berbagai aktor dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan proyek. Berlandaskan konsep Implementasi Organisasi Internasional, pelaksanaan proyek EPASS dalam melalui pendekatan *managerial* berpusat pada pengelolaan dan bersifat terbuka dengan memberikan bantuan teknis dan keuangan guna mengembangkan kapasitas negara.

Lebih dalam, melalui pendekatan ini penulis melihat bagaimana peran UNDP-GEF melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *managerial* sebagai berikut:

1. Dengan memberikan bantuan teknis dan keuangan sehingga perencanaan program untuk mencapai tujuan proyek dapat terlaksana dengan baik. Hadirnya tim pendamping dan fasilitator desa sebagai bentuk dari bantuan teknis memberikan kemudahan kepada pihak lokal yang terlibat seperti LPKD dan pemerintah desa, sebab pengelolaan bantuan dana yang diberikan merupakan bantuan dari campur tangan pendamping desa kepada LPKD dan pemerintah desa agar dana yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan LPKD yang diajukan kepada UNDP untuk mendapatkan dukungan dana hibah.
2. Selain itu, penulis melihat bagaimana pendekatan *managerial* yang memiliki sifat terbuka dan dapat dikelola ini menjalin kerja sama dengan berbagai aktor dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan TNLL. Dalam menjalankan proyeknya UNDP-GEF melakukan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan sebagai mitra pelaksana proyek EPASS, dengan melibatkan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan tokoh masyarakat desa. Kerja sama antar aktor tersebut memberikan kemudahan terhadap bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat di

kawasan TNLL dapat berjalan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam peningkatan ekonominya. Untuk menjalankan upaya pemberdayaan maka dibentuk Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa (LPKD) oleh pemerintah desa yang berperan dalam membimbing, mengayomi, dan mengawasi kegiatan.

3. Tidak hanya menjalin kerja sama dengan berbagai aktor, namun juga adanya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang dilakukan melalui *monitoring* dan *evaluation tools*. *monitoring* dilakukan melalui 2 sisi, dari sisi keuangan dan dari sisi teknis. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) baik ditingkat nasional di kantor *Project Manager Unit* ataupun ditingkat lapangan *Project Implementing Unit*, hal ini dilakukan guna mengantisipasi agar tidak terjadinya penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan.
4. Lalu, pengawasan juga dilakukan melalui sisi teknis dengan adanya tim yang memonitoring kegiatan turun langsung ke masyarakat dengan tujuan mengetahui bagaimana proyek berdampak bagi masyarakat desa dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lapangan berjalan dengan baik. Pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat lapangan untuk melakukan monitoring pelaksanaan *annual work plan* atau rencana kerja satu tahun yang disusun secara bersama-sama dengan

KLHK dan Balai Besar TNLL, secara rutin dilakukan 1 atau 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan pelaksanaan.

5. Melalui proyek ini, tim UNDP-GEF memberikan manfaat besar dalam peningkatan kapasitas negara hal tersebut dapat dilihat melalui aktor negara yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, terutama Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan menerima kegiatan berupa *monitoring* analisis guna mengetahui bagaimana menjaga kondisi kawasan, melestarikan flora dan fauna, BBTNLL menerima bantuan kegiatan survei untuk meningkatkan kapasitas sistemik dan kelembagaan untuk perencanaan dan pengelolaan sistem kawasan konservasi dengan cakupan pelaksanaan *Resort Based Management* (RBM) dan mendapat bantuan untuk meningkatkan kemampuan efektif dalam menilai kinerja *resort* dengan membentuk sistem evaluasi dan pelaporan atau koordinasi yang efektif.

Dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat TNLL peranan UNDP-GEF melalui proyek EPASS memberikan banyak bantuan dan perlahan membuka jalan kepada masyarakat untuk mendapatkan peningkatan pendapatan ekonominya, selain itu terwujudnya jalinan kerja sama yang baik antara pihak Balai Besar TNLL dengan pemerintah desa melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang kemitraan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat di zona tradisional Taman Nasional Lore Lindu.

Inilah peranan UNDP-GEF sebagai organisasi internasional dalam memberi pengaruh kepada Indonesia untuk mengimplentasikan dan patuh terhadap *Conventional on Biological Diversity* (CBD) melalui proyek EPASS dengan pendekatan *managerial*, pengelolaan TNLL berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan memberi dampak baik terhadap masyarakat dengan adanya pengelolaan yang diberikan melalui akses kelola lembaga, akses kelola kawasan, dan akses kelola usaha.

4.2 Rekomendasi

Penulis mengajukan beberapa rekomendasi dalam penelitian ini.

Pertama, rekomendasi penulis ajukan kepada Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan perannya dalam meningkatkan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat pasca proyek EPASS, agar pendampingan pemberdayaan masyarakat tetap berkelanjutan, sehingga pengelolaan bersama terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu dapat terwujud dengan baik.

Rekomendasi lainnya penulis sampaikan kepada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pendampingan kepada masyarakat desa sekitar kawasan sebagaimana melalui pendekatan *managerial* yang dilakukan oleh UNDP-GEF selama proyek EPASS. Sehingga, kualitas akses kelola kawasan, akses kelola usaha, dan akses kelola lembaga dapat meningkat, serta upaya yang telah dilakukan UNDP-GEF beserta pihak domestik yang terlibat tetap terjaga

apabila Balai Besar TNLL pro aktif mengelola manfaat yang sudah diterima selama pasca pelaksanaan proyek tersebut.

Rekomendasi selanjutnya penulis tujukan kepada masyarakat yang juga berperan penting dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya Taman Nasional Lore Lindu secara lestari dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan selama proyek EPASS berlangsung merupakan bagian penting guna menjadi pelajaran yang dapat terus digunakan sebagai acuan masyarakat dalam menjaga pengelolaan kawasan konservasi agar masyarakat itu sendiri dapat berdaya dan sejahtera dari sisi ekologi, sosial dan ekonominya.

Peneliti juga merekomendasikan kiranya adanya penelitian lanjutan untuk melihat dampak dari proyek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UNDP-GEF di Taman Nasional Lore Lindu agar dapat mengetahui keberlanjutan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNL).

DAFTAR PUSTAKA

- A.T.Jadda, Asram. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati." *Journal Malre, Vol.3 No .1*, Juni 2019.
- Abraham Neil, Golar, Hamzari. "29 Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Taman Nasional Lore Lindu." *e-Jurnal Mitra Sains Vol. 4 No.1* , 2016.
- Adi Widiyanto, Agus Budi Sutito, All. *Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2015.
- Afianto, Muhammad Yayat, wawancara oleh Zelya Nadia Kirana. *Peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui proyek EPASS (April 2022)*.
- Aida, Amanah. "Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam." *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam Vol 5. No 1*, 2017.
- Antara, Made. "Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Peran di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Untuk Mencari Rotan." *Jurnal Agrisains Vol.6 No.2*, 2005.
- Archer, Clive. *International Organization 3rd* . London: Routledge, 2003.
- Azir, wawancara oleh Zelya Nadia Kirana. *Peran UNDP-GEF dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui Proyek Epass (April 2022)*.
- Baker, Susan. *Sustainable Development*. USA and Canada: Routledge, 2006.
- Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, BBTNL. *Sejarah, Definisi dan Fungsi Taman Nasional Lore Lindu*. 2020. http://lorelindu.info/?page_id=1111.
- Balai Besar TN Lore Lindu. *Membina Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa Sekitar TN Lore Lindu*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019.
- BP3D, Sigi. "Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020." *RKPD Kabupaten Sigi*. 2019. <https://sigikab.go.id/dokumen%202020/RKPD%20TAHUN%202020.pdf> (diakses 2022).
- BPK, JDIH. *Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa NO.28 TAHUN 2011*. 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5157>.

- Cesar, wawancara oleh Zelya Nadia Kirana. *Peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu* (April 2022).
- Dewi Sulastriningsih, Wenda Yandra Komara, Muhammad Muchlis, Erwin Willianton. *Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.
- Dr. Sudirman Dg Massiri, S.Hut., M.Sc. *Membangun Kesepakatan Konservasi Masyarakat; Sebuah Proses Pembelajaran Kolaborasi Pengelolaan di Taman Nasional Lore Lindu*. Palu: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, November 2019.
- EPASS. *lokasi Epass Taman Nasional Lore lindu*. 2020. <https://epassindonesia.org/lokasi-proyek/>.
- Goertz, James Mahoney and Gary. "A Take of Two Cultures : Contrasting Quantitative and Qualitative Research." *Political Analysis, Vol.14*, 2006.
- Guru Besar Perbandingan Sistem Politik . *Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*. Surabaya: Kacung Marijan, Universitas Airlangga, 2017.
- Hafhiz, Abdul. "Peranan Global Environment Facility (GEF) Dalam Membantu Mengatasi Permasalahan Lingkungan Di Negara Cina 2010-2014." *JOM Fisip Vol.3 No.1* (Yayasan Swarna Bhumi), 2016.
- Hafiz, Abdul. "Peranan Global Environment Facility (GEF) dalam Membantu Mengatasi Permasalahan Lingkungan di Negara Cina 2010-2014." *JOM Fisip vol.3 No.1*, 2016.
- Ilham, wawancara oleh Zelya Nadia Kirana. *Peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui Proyek EPASS* (April 2022).
- Irmasari, Flora Pasar, Usman Made. "Pengembangan Desa Konservasi Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Lore Lindu." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.6 No.11* , 2018.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek. "Political Theory and European Union." Dalam *International Organizations and Implementation*, oleh Bob Reinalda, Bertjan Verbeek Jutta Joachim. London and New York: Routledge, 2008.

- Kassa, Saharia. "Konsep Pengembangan Co-Management untuk Melestarikan Taman Nasional Lore Lindu." *Bogor Agricultural University*, 2009.
- Kauppi, Paul R Viotti & Mark. *international relations and world politics: security, economy, Identity*. New Jersey, Prentice Hall, 1997.
- KEHUTANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN. *Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. 2015. http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/Petunjuk_Teknis_Penyusunan_Zona-Blok.pdf.
- Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan. *Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam* Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
- Klarin, Tomislav. "The Concept of Sustainable Development ." *Zagreb International Review of Economics & Bussines*, 2018.
- Kuswartojo, Tjuk. "Agenda 21, GEF dan Alih Teknologi." *Jurnal Teknologi Lingkungan Volume 3, Nomor 3*, 2002.
- Massiri, Sudirman Daeng. "Preferensi dan Motivasi Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi tengah." *Manusia Dan Lingkungan Vol.23 No.2*, 2016.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol,15 No.1*, 2011.
- Nasri, Tahir, wawancara oleh Zelya Nadia Kirana. *Peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui proyek EPASS* (April 2022).
- Nurhaya. "Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan Desa Wombo Kalongo." *Jurnal Warta Rimba, Vol.8 No.1*, 2020.
- PELH, Direktorat. "Diplomasi Multilateral." *Sustainable Development Goals: Usulan Norma Baru Pembangunan Global Vol 1, No 1*, 20 Maret 2012: 17-20.
- Presinde RI (Republik Indonesia). "Perpustakaan MENLHK." *BPHN*. 1994. <http://bphn.go.id/data/documents/94uu005.pdf> (diakses 2022).
- Saharia Kassa, Hadi S Alikodra, Bunasor Sanim, Sambas Basuni. "CO-Management Untuk Menginisiasi Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Lore Lindu." *Jurnal Agroland Vol.15 No.4*, 2008.

- Sekar Panaluh, Meila Riskia Fitri. “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.” *International NGO Forum Of Indonesia*, 2016.
- Setyowati, Enik. “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi.” *Jurnal Artefak*, 2021.
- Sigi, BPS-Statistics of. *Sigi in Figures, Delivering Data to Inform Development Planning*. PALU: UD.RIO PALU, 2020.
- Siombo, Marhaeni Ria. “Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Jurnal Hukum VOL.18 No.3*, 2011.
- Sorensen, Robert Jackson & Georg. *Introduction to International Relation*. Oxford: Oxford university Press, 2013.
- Statistik, Badan Pusat. *Kecamatan Gumbasa Dalam Angka 2017-2020*. Palu: BPS Kabupaten Sigi, 2020.
- Subandi. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian.” *Jurnal Harmonia Vol, 11 No.2*, 2011.
- Sudirman Daeng Massiri, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodiharjo, Rinekso Soekmadi. “Preferensi Motivasi Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu.” *Manusia dan Lingkungan Vol,23 No.2*, juli, 2016: 215-223.
- Sudirman. “Tinjauan Implementasi Pembanguna Berkelanjutan : Pengelolaan Sampah Di Kota Kendari.” *Jurnal Sosial Politik Vol 5, No 2*, 2019.
- Suprayitno, Adi Riyanto. “Pelibatan Masyarakat Lokal:Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari.” *Jurnal Penyuluhan Vol.4 NO.2* , 2018.
- Thaha, Abdul Rahim. *Erosi Tanah di Taman Nasional Lore Lindu*. Palu: The Nature Conservancy, Lore-Lindu Field Office, 2001.
- UNDP. *GEF - Enhancing Protected Area in Sulawesi (E-PASS)*. 2016. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/projects/sistem-monitoring-imunisasi-logistik-secara-elektronik--smile-1.html>.
- . “United Nations Development Programme Project Document.” *UNDP-TRANSPARENCY PORTAL*. 2015. [https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/4392%20EPASS%20Prodoc%20v%2018%20Feb%202015%20\(Final\)-2_signed.pdf](https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/4392%20EPASS%20Prodoc%20v%2018%20Feb%202015%20(Final)-2_signed.pdf) (diakses 2022).

White, Mark. "Lesson Learned : Collaborative Management at Lore Lindu National Park." *The Nature Conservancy*, 2010.

Widjajanto, Danang. "Degradasi Lahan di Taman Nasional Lore Lindu." *Indoctury Science Philosophy*, 2003.

Zarlif, wawancara oleh Zelya Nadia Kirana. *Peran UNDP-GEF dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu melalui proyek EPASS* (April 2022).

Zulkaidhah, Rukmi, Ariyanti. "Pengelolaan Lahan Agroforestry di Kawasan Penyangga Taman Nasional Lore Lindu." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.9 No.2, 2021.



Lampiran 1. Tabel Pertanyaan Wawancara

Nama	Jabatan	Persetujuan Wawancara	Tanggal wawancara	Pertanyaan Wawancara
Muhammad Yayat Afianto	<i>Monitoring And Reporting Officer UNDP Indonesia</i>	Setuju	03-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana UNDP mengelola proyek ini secara terbuka dan dapat diterapkan di TNLL? 2. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan UNDP? 3. Bagaimana UNDP memberikan bantuan teknis kepada masyarakat? 4. Bagaimana UNDP melakukan pengawasan dalam proyek EPASS? 5. Apakah terdapat hambatan dalam melakukan pengawasan dalam proyek ini? 6. Apakah dalam proyek ini UNDP melakukan kerja sama dengan mitra lain ? 7. Bagaimana UNDP melakukan kerja sama dengan mitra lain? 8. Apakah ada hambatan dalam menjalankan proyek?

				9. Bagaimana keterkaitan antara UNPD dan GEF dalam proyek ini?
Cesar A.M., S.Hut.T.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawasan di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu	Setuju	03-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama proyek EPASS dilaksanakan bagaimana UNDP memberikan bantuan kepada masyarakat? 2. Selama proyek EPASS dilaksanakan penguatan kapasitas apa yang telah dilaksanakan bersama UNDP? 3. Selama proyek EPASS dilaksanakan apakah UNDP bermitra dengan pihak lain? 4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh UNDP selama proyek ini berlangsung? 5. Sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, apakah UNDP-GEF membantu BBTNL terhadap pemberdayaan masyarakat di TNLL? 6. Apakah pengawasan hanya dilakukan dari

				<p>pihak UNDP ataukah ada badan pengawas lain?</p> <p>7. Bagaimana mekanisme pengawasan dan laporan terkait dana hibah yang diterima oleh LPKD dari UNDP?</p>
Zarlif S.P	Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat	Setuju	04-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama proyek EPASS bagaimana proses pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan? 2. Dalam pelaksanaan ditingkat desa, apakah dilakukan secara terbuka? 3. Apakah Epass memberikan sumbangsih kepada masyarkat? Apa saja bentuknya? 4. Apakah ada hambatan dalam menjalankan kemitraan dan pengembangan dalam program EPASS?

Azir S.Pd	Ketua Lembaga Pengelola Konservasi (LPKD) Desa Pakuli Utara	Setuju	04-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan selama proyek EPASS 2016-2020? 2. Selama upaya pemberdayaan berlangsung apakah ada dukungan dana yang diberikan kepada LPKD? 3. Bagaimana mekanisme penerimaan dana tersebut? 4. Bagaimana penggunaan dan mekanisme laporan pertanggung jawaban dana tersebut?
Ilham	Ketua Lembaga Pengelola Konservasi (LPKD) Desa Simoro	Setuju	05-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan selama proyek EPASS 2016-2020? 2. Selama upaya pemberdayaan berlangsung apakah ada dukungan dana yang diberikan kepada LPKD? 3. Bagaimana mekanisme penerimaan dana tersebut? 4. Bagaimana

				penggunaan dan mekanisme laporan pertanggungjawaban dana tersebut?
Zulfan	Sekretaris Desa Pakuli Utara	Setuju	05-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat pemerintah desa terhadap proyek EPASS? 2. Hal-hal apa saja yang terwujud? 3. Apakah ada perjanjian kerja sama antara BBTNLL dengan pemerintah desa? 4. Bagaimana terlaksana perjanjian kerja sama tersebut? 5. Dalam PKS tersebut ada lembaga pengelola konservasi desa, bagaimana dukungan UNDP/EPASS kepada LPKD? 6. Apakah pemerintah desa terlibat dalam melakukan pengawasan proyek tersebut? 7. Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan? 8. Apakah terdapat hambatan selama proyek berjalan?
Tahir Nasri	Kepala Desa Simoro	Setuju	06-04-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat pemerintah desa

				<p>terhadap proyek EPASS?</p> <p>2. Hal-hal apa saja yang terwujud?</p> <p>3. Apakah ada perjanjian kerja sama antara BBTNLL dengan pemerintah desa?</p> <p>4. Bagaimana terlaksana perjanjian kerja sama tersebut?</p> <p>5. Dalam PKS tersebut ada lembaga pengelola konservasi desa, bagaimana dukungan UNDP/EPASS kepada LPKD?</p> <p>6. Apakah pemerintah desa terlibat dalam melakukan pengawasan proyek tersebut?</p> <p>7. Bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut?</p> <p>8. Apakah terdapat hambatan selama proyek berjalan?</p>
--	--	--	--	--

Lampiran 2. Interview Transcript

1. Monitoring and Reporting Officer UNDP Indonesia- Yayat Afianto

Interviewer	Seperti yang kita ketahui, UNDP merupakan organisasi internasional yang peranannya sangat berpengaruh di Indonesia
--------------------	--

	<p>sebagai pemberantas kemiskinan, mengurangi ketidaklayakan dan ketidaksetaraan hidup, membantu mengkoordinasikan bantuan logistik Indonesia kepada GEF atau <i>Global Inveronment Facility</i> yang merupakan institusi keuangan multilateral bidang lingkungan, sehubungan dengan itu di tahun 2016-2020 UNDP-GEF melaksanakan proses EPASS sebagai bentuk bantuan dukungan proyek kerja sama terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seperti itu ya Pak?</p>
Interviewee	<p>Sedikit koreksi, jadi dananya itu asalnya dari GEF untuk di Indonesia proyek ini dilaksanakan melalui fasilitasi dari UNDP Indonesia, jadi UNDP Indonesia sebagai <i>executing agency</i> jadi bukan <i>Founding</i>, jadi UNDP Indonesia pelaksananya. Nah, jadi sumber dananya itu dari GEF. Di Indonesia untuk proyek EPASS itu UNDP sebagai EAE kalau bahasa inggrisnya itu <i>Executing Agency</i> itu bekerja sama dengan KLHK, KLHK ini sebagai <i>IP Implementing Partner</i> sebagai partner pelaksananya mendampingi UNDP itu adalah KLHK, dalam hal ini merupakan direktorat KKH (Konservasi Keanekaragaman Hayati).</p>
Interviewer	<p>Kita masuk pada pertanyaan pertama ya pak, jadi bagaimana UNDP menjalankan proyek ini secara transparan dan terbuka dan dapat dikelola di Taman Nasional Lore Lindu?</p>
Interviewee	<p>oke, jadi kalau terkait dengan masyarakat di sekitar kawasan adalah sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kawasan. Jadi sehari hari yang berhubungan langsung dengan taman nasional makanya untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang berkeadilan, terbuka dan partisipatif untuk sustainable living kita mendekati desa-desa yang ada di sekitar taman nasional. Pendekatannya adalah <i>Community Conservation Agreement (CCA)</i></p>

	<p>jadi kita pendekatannya melalui pendekatan kelompok, <i>awareness rising activitis</i> membangun kepedulian masyarakat terhadap kawasan untuk menjaga dan tidak merusak lalu bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan secara langsung dengan menyusun proposal, misalnya ada satu kelompok bikin proposal pengelolaan ekowisata jadi mereka bikin rencananya seperti apa, berapa orang kebutuhannya, melalui proposal tersebut UNDP melalui proyek ya.. itu menggunakan dana tersebut untuk dipakai oleh kelompok. Jadi diseleksi lagi proposal tersebut lalu dibantu dari awal dari penyusunan proposal, penulisan proposal ya itu kita dampingi sampai mereka bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan mereka.</p>
Interviewer	<p>Jadi bisa dibilang UNDP ini terjun langsung juga ya pak?</p>
Interviewee	<p>Kita melalui ini PMU namanya, PMU itu <i>Project Management Unit</i> jadi bukan saya sebagai staff UNDP tidak terjun langsung ke lapangan <i>day to day</i>. Jadi di tingkat Jakarta di tingkat nasional itu ada yang namanya PMU kantornya di KLHK Manggala, nah di bawah PMU ini ada yang di sebut dengan PIU <i>Project Implementing Unit</i> ada di masing-masing daerah. Kita itu ada 3 side nah jadi yang mendampingi masyarakat itu yang di lapangan. Kalau ketemu dengan NGO dengan kelompok ibu-ibu lalu bikin <i>workshop</i> latihan dan lain lain itu PMU beserta PIU, nah saya di tingkat nasional di kantor UNDPnya itu memantau dan memonitor jadi saya kadang kesana melihat pembukaan <i>workshop</i> lalu saya kasih arahan bagaimana ini bisa berdampak ke masyarakat.</p>
Interviewer	<p>Baik lanjut ya pak ke pertanyaan selanjutnya, jadi dalam mengelola proyek ini UNDP dan GEF sendiri sudah memberikan bantuan secara teknis dan keuangan, gimana itu pak?</p>

Interviewee	<p>Betul, seperti yang sudah saya sebutkan pertama dari <i>capacity building</i> bantuannya dalam bentuk <i>training</i>, <i>trainingnya</i> macam-macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok misalnya butuh untuk peningkatan ekonomi dari bisnis kuliner lalu kita fasilitasi pelatihan bikin kue, lalu yang satu bagaimana untuk menjalankan bisnis ekowisata arum jeram nah kita fasilitasi <i>training</i>, tapi sebelum itu kita fasilitasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok tersebut dilihat dari potensi wilayah, kalau memang untuk ekowisata kita latih untuk bikin proposal mengenai ekowisata, Sambil menyusun proposal kita bantu membuat PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara kelompok masyarakat tersebut dengan Kepala Balai. Soalnya mereka kebanyakan pendidikannya kurang ya.. kita bantu penulisan PKS, sampai PKSnya di tanda tangan kalau gak salah totalnya dari 3 side itu ada 38 PKS, Taman Nasional Lore Lindu salah satu sidenya. Nah lalu kita juga bantu untuk bagaimana Balai Taman Nasional itu kita bantu secara teknis untuk mereka mempersiapkan rencana keuangan taman nasional supaya mereka bisa dapat pendanaan tidak hanya dari pemerintah pusat tapi kita bantu melihat kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari luar APBN jadi seperti itu.</p>
Interviewer	<p>Kalau untuk kerajinan rotan seperti itu termasuk ya pak?</p>
Interviewee	<p>Mmm betul, jadi kita melalui teman-teman yang di lapangan ya yang mendampingi itu kita bantu secara keuangan supaya <i>workshop</i> latihan itu berjalan dan kita juga biasanya mengundang narasumber dari tempat lain yang sudah biasa misalnya kerajinan tangan, kita lihat dari sekitar situ ada gak yang punya keahlian itu kita undang lalu kita undang untuk datang ke desa lalu bikin pelatihan.</p>
Interviewer	<p>Lanjut ya pak, lalu terkait pengawasan proyek agar berjalan</p>

	mencapai tujuannya dari UNDP sendiri bagaimana pak?
Interviewee	Oke untuk pengawasan ini ada beberapa <i>monitoring and evaluation tools</i> jadi ada pemeriksaan keuangan itu dilakukan oleh auditor independen baik di tingkat nasional di kantor PMU atau pun di tingkat lapangan PIU jadi didatangi juga mereka untuk melihat laporan keuangan jangan samapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan keuangan. Dari sisi teknis itu ada tim yang memonitoring kegiatan turun langsung ke masyarakat, jadi kita turun langsung ke masyarakat lalu bertanya bagaimana proyek berdampak kepada mereka, apakah proyek ini bermanfaat atau tidak untuk kelompok masyarakat disana jadi kita tidak mendengar dari orang lain tapi kita bertemu langsung dengan masyarakat bertanya ke mereka ada manfaatnya ga ada terus ada <i>complain</i> ga terhadap perjalanan proyek. Jadi pada intinya ada dua <i>monitoring</i> yaitu dari sisi keuangan dan teknis.
Interviewer	Kalau dari sisi keuangannya sendiri itu dari tim GEFnya?
Interviewee	Enggak, kalau dari sisi keuangan timnya KAP ya Kantor Akuntan Publik kita pilih yang ada di Jakarta atau biasanya kita <i>biding</i> dulu umumkan ke publik kalau kita mau evaluasi proyek kita butuh Kantor Akuntan Publik lalu mereka mengajukan proposalnya masing-masing KAP lalu kita pilih setelah mereka terpilih baru mereka turun lapangan. Kalau anggota GEF itu ikut dengan saya biasanya untuk monitoring teknis jadi biasanya staff GEF ikut.
Interviewer	Kalau untuk pertemuan atau <i>meeting</i> secara rutin itu dilaksanakan ya pak?
Interviewee	Pertemuan rutin dengan siapa maksudnya?
Interviewer	Kayak untuk mngevaluasi proyek ini dengan pihak Balai, pihak

	KLHK..
Interviewee	Iya itu rutin biasanya untuk di tingkat daerah ya di tingkat lapangan rutin mereka ketemu koordinasi terutama untuk memonitoring <i>annual work plan</i> , jadi sebelum misalnya kegiatannya sudah dipersiapkan untuk tahun 2017 lalu kita menyusun AWP <i>annual work plan</i> itu rencana kerja dalam satu tahun nah ini disusun dengan KLHK dan taman nasional masing-masing, nah itu secara rutin bisa dua minggu sekali atau sebulan sekali pertemuan dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan minimal sebulan sekali. Jadi kalau PIU itu koordinasinya dengan pihak Balai di <i>side</i> kalau PMU itu koordinasinya dengan direktorat KKH di kantor KLHK
Interviewer	Oke, jadi dalam pelaksanaan proyek ini bagaimana UNDP melakukan kerja sama dengan mitra lain?
Interviewee	Mitra lain maksudnya apa?
Interviewer	Seperti terjalannya kerja sama UNDP sendiri dan pihak KLHK, dari UNDP ke Balai Taman Nasional apakah juga dilakukan perjanjian kerja sama?
Interviewee	Oh iya, kalau UNDP dengan KLHK kita sudah punya perjanjian sejak lama tapi untuk masing-masing proyek kita juga ada yang disebut <i>mitra project</i> biasanya NGO pihak LSM yang kita butuhkan keahlian mereka dari sisi teknis misalnya, bagaimana mendampingi masyarakat untuk membentuk kelompok patroli hutan.. misalnya kaya gitu itu kerja sama bisa dengan NGO lokal atau NGO nasional itu kita lakukan juga, dan NGO ini harus punya perjanjian kerja sama yang jelas dengan pihak KLHK, jadi semuanya diputuskan melalui KLHK ya sebagai kementerian yang mewakili Indonesia jadi NGO-NGO itu nanti berhubungan langsung dengan pihak balai

	di lapangan.
Interviewer	Apa sama seperti itu ya pak tim audit independen?
Interviewee	Beda ya.. kalau tim audit ini tim evaluasi aja ya kalau <i>mitra project</i> itu mendampingi di lapangan misalnya untuk bagaimana sih menjalankan konservasi pelestarian satwa itu kita minta bantuan NGO, mereka bisa dua sampai tiga tahun kerja samanya dengan proyek kalau kantor akuntan publik kan hanya beberapa hari mereka mengevaluasi tapi kalau <i>mitra project</i> itu bisa bertahun-tahun.
Interviewer	Apa keterkaitan antara UNDP dan GEF dari segi keuangan?
Interviewee	Itu tadi yang saya jelaskan paling awal ya jadi dananya itu dari GEF (<i>Global Environment Facility</i>) lalu biasanya setiap beberapa tahun itu GEF membuka kesempatan untuk tema-tema tertentu untuk <i>executing agency</i> seperti UNDP ikutan proposal, jadi UNDP mengajukan proposal ke GEF.. kita usulkan ke GEF “ini kami mau mengusulkan proyek EPASS” lalu diperiksa oleh GEF, oke ini memenuhi syarat rencananya bagus sesuai dengan kebutuhan dan tema dari GEF akhirnya di pilih setelah itu UNDP sejak awal mengajak KLHK yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya tidak hanya dengan KLHK ya dengan kementerian lain juga ada yang dilakukan oleh UNDP jadi untuk proyek ini kita kerja samanya dengan KLHK dan Bappenas, jadi ini tolong di catat juga IP nya dari sisi pemerintah itu ada dua Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ada Bappenas
Interviewer	Jadi dari UNDP nya dulu ya pak yang mengajukan proposal?
Interviewee	Iya betul
Interviewer	Setelah disetujui dari GEF baru dananya bisa diberikan ke

	proyeknya?
Interviewee	Betul
Interviewer	Yang memilih taman nasional sebagai target dari EPASS itu siapa ya pak? Dari UNDP sendir yang turun langsung kah?
Interviewee	Dari UNDP nya, jadi waktu kita menyusun proposal kita riset dulu riset data lokasi mana si yang mendapat tekanan besar terhadap konservasi, misalnya tingkat deforestasinya tinggi, atau satwanya banya yang mati atau masyarakatnya yang merusak hutan.. nah itu yang kita pilih
Interviewer	Baik, terimakasih banyak pak untuk waktunya
Interviewee	Iya sama-sama.. terima kasih semoga lancar ya
Interviewer	Aamiin, semoga sehat selalu pak
Interviewee	Aamiin, Assalamu'alaikum.
Interviewer	Wa'alaikumssalam, Saya izin <i>end meeting</i> ya pak.

2. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawasan di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu- Cesar A.M., S.Hut.T

Interviewer	Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin sedikit menyampaikan sedikit pengetahuan saya dari proyek ini, bahwa proyek EPASS merupakan proyek dukungan dari <i>United Nation Development Program</i> atau UNDP dan dibantu oleh pendonor dana hibah yaitu GEF (<i>Global Environment Facility</i>) yang dimana telah dilakukan pelaksanaan proyek mulai dari tahun 2016-2020, masuk ke pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan bahwa bapak sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu melihat selama pelaksanaan proyek EPASS ini bagaimana UNDP memberi bantuan kepada masyarakat di kawasan
--------------------	--

	Taman Nasional Lore Lindu?
Interviewee	<p>Terkait dengan bantuan UNDP melalui EPASS proyek di Taman Nasional Lore Lindu selama 2016-2020 itu UNDP melalui EPASS mengembangkan skema pengembangan kemitraan konservasi terhadap 16 desa di sekitar Taman Nasional Lore Lindu, bantuan-bantuan yang diberikan oleh UNDP kepada masyarakat itu sebenarnya ada namanya dana <i>small grant</i> itu kurang lebih seratus empat puluh juta perdesa tetapi bentuk kegiatan terhadap penggunaan dana <i>small grant</i> itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, jadi Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan EPASS berkunjung ke masing-masing desa memfasilitasi masyarakat untuk menggali potensi melihat kondisi dan merumuskan kebutuhan pengembangan Lembaga Pengelola Konservasi Desa, jadi UNDP memberikan <i>small grant</i> dan dana itu akan dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat terhadap 16 desa di sekitar Kawasan Taman Nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tetap dengan prinsip kelestarian kawasan Taman Nasional Lore Lindu.</p>
Interviewer	<p>Baik, setelah diberikan bantuan lalu selama dilaksanakan proyek EPASS ini penguatan kapasitas apa yang telah dilakukan bersama dengan UNDP?</p>
Interviewee	<p>Penguatan kapasitasnya ada beberapa, seingat saya ada peningkatan kapasitas terkait laporan keuangan, ada peningkatan kapasitas terkait bagaimana teknik-teknik mendokumentasikan kegiatan, mendokumentasikan program, dan memperkenalkan kegiatan masyarakat melalui media sosial. Ada juga beberapa pelatihan terkait pengembangan-pengembangan produk dan seingat saya ada beberapa perwakilan masyarakat yang dikirim untuk belajar seperti</p>

	kunjungan belajar ke PT.Taman Nasional yang lain seperti Tangkahan untuk mempelajari bagaimana pola pengembangan pariwisata masyarakat yang ada di taman nasional Tumbuluesser untuk diterapkan atau diaplikasikan di Taman Nasional Lore Lindu
Interviewer	Baik, selama sudah diberikan bantuan dan sudah dilakukan beberapa upaya untuk penguatan kapasitas masyarakat disana, apakah pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu melakukan kerja sama dengan mitra lain dalam proyek ini?
Interviewee	Setau saya, murni dari tim EPASS dan Lore Lindu yang mengawal atau menyelesaikan proyek tapi kalau kerja sama secara resmi dengan pihak lain kami tidak menjalin itu karena Balai Taman Nasional menjalin kerja sama itu ada dokumen perjanjian kerja sama tapi kalau beberapa kegiatan EPASS itu melibatkan beberapa pihak lain seperti misalnya perguruan tinggi dari Universitas Tadulako itu kami libatkan di beberapa kegiatan EPASS, kayak survei potensi Hasil Hutan Bukan Kayu setiap desa yang akan bermitra terus <i>monitoring</i> atau survei di taman nasional.
Interviewer	Seperti tim fasilitator atau tim pendamping ya pak?
Interviewee	Kalau tim pendamping itu ada direkrut sendiri dari EPASS ada khusus koordinator pemberdayaan masyarakatnya dan direkrut beberapa pendamping untuk mendampingi kegiatan-kegiatan EPASS di desa, biasanya sih orang-orang yang disitu sarjana kehutanan atau sarjana sosial yang berdomisili di lokasi yang akan mereka dampingi itu di rekrut oleh EPASS juga untuk mendampingi dan mengawasi kegiatan
Interviewer	Baik, bagaimana UNDP dan pihak Balai sendiri melakukan pengawasan dalam proyek ini pak?

<p>Interviewee</p>	<p>Kalau pengawasan, kita biasanya ada rapat bulanan rapat <i>monitoring</i> terhadap kegiatan EPASS baik yang dilaksanakan di Balai atau yang dilaksanakan di lapangan ada rapat evaluasinya setiap bulan, kami merekrut tenaga pendamping untuk mengawasi kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan yang dibuatkan masyarakat seperti Perjanjian Kerja Sama kemitraan konservasi, setau saya juga pernah pengawasannya itu ada bentuk laporan dana hibah, sebelum pencairan <i>small grant</i> itu Lembaga Pengelola Konservasi Desa menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, anggaphlah tahapan pencairan dana pertama mereka harus mempertanggung jawabkan dana yang sudah dicairkan melalui laporan keuangan melalui nota-nota bahkan di akhir-akhir proyek mereka harus presentasi di depan EPASS pusat untuk menjelaskan bagaimana <i>progress</i> kelompok dari 16 desa itu ada evaluasinya dari PMU</p>
<p>Interviewer</p>	<p>Baik, sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek EPASS ini apakah UNDP-GEF memberikan bantuan terhadap Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu?</p>
<p>Interviewee</p>	<p>Sebenarnya kalau untuk bantuan anggaran itu dikelola sendiri oleh EPASS, dalam bentuk kegiatan seperti yang sudah saya bilang pertama tadi bantuan untuk memfasilitasi Perjanjian Kerja Sama di 16 desa di sekitar kawasan Taman Nasional, terus bantuan kegiatan berupa <i>monitoring analysis</i> ada juga bantuan seperti untuk mengikuti kegiatan <i>monitor survei</i> keberadaan Anoa dan Babi Rusa di Taman Nasional Lore Lindu dan sebenarnya banyak kegiatan yang dibantu oleh EPASS dalam balai taman nasional.</p>
<p>Interviewer</p>	<p>Baik, apakah pengawasan yang dalam proyek EPASS ini <i>pure</i> hanya dilakukan oleh UNDP pak?</p>

Interviewee	Setau saya, dulu pernah ada juga UNDP merekrut Audit Independen untuk pengawasan proyek EPASS cuman saya tidak ingat nama konsultannya apa tapi itu setau saya ada audit independen untuk kegiatan EPASS, tapi itu direkrut oleh UNDP untuk mengaudit proyek EPASS baik dari segi anggaran maupun kegiatannya, UNDP itu merekrut pihak lain untuk melakukan pengawasan.
Interviewer	Oke, pertanyaan terakhir dari saya.. Bagaimana Mekanisme pengawasan dan laporan terkait dana hibah yang diterima oleh LPKD dari UNDP?
Interviewee	Jadi setiap dana hibah itu dicairkan berdasarkan seingat saya itu sampai tiga kali pencairan itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, jadi teman-teman di lapangan memfasilitas untuk “140 juta ini akan kita apakan?” itu hasil diskusi dengan masyarakat ya LPKD.. setelah diskusi diketahui gimana sih program-program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat bersama taman nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan uang 140 juta. Setelah itu ada PKS penggunaan anggaran antara LPKD dengan BPK EPASS di Jakarta selanjutnya setelah uangnya cair, uang itu harus dicairkan oleh LPKD itu sendiri bukan dicairkan oleh pihak EPASS ataupun Pihak taman nasional tapi LPKD yang membuka rekening waktu itu BNI kalau tidak salah, setelah anggaran cair pihak LPKD harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan apa yang sudah mereka gunakan terhadap uang yang telah dicairkan tadi. Dari 140 juta anggaplah pencairan pertama 50 juta misalnya mereka beli laptop “notanya mana?” terus ada juga yang bikin persemaian “notanya mana? Kebutuhan alat dan bahannya seperti apa? Mana dokumentasi sebelum dan setelah pelaksanaannya?” dan intinya apa yang sudah mereka lakukan itu harus dituangkan dalam laporan dan akan diverifikasi oleh pendamping desa, dari tim

	EPASS dan dari PPK dan terakhir akan diketahui oleh Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, jadi penggunaan uang sepeserpun itu harus diketahui oleh kami dan harus dipertanggungjawabkan melalui dokumentasi, bukti-bukti pembayaran hasil verifikasi di lapangan.
Interviewer	Baik, izin memastikan berarti selama penurunan dana ini berlangsung dilakukan tiga tahapan lalu dana tersebut langsung diterima oleh LPKDnya itu sendiri?
Interviewee	Iya, jadi pihak taman nasional dan pihak EPASS itu hanya mendampingi mereka ke bank untuk pencairan jadi uangnya tidak sama kami.
Interviewer	Baik, lalu jika dana sudah cair dan dilakukan penggunaan untuk dana tersebut setelah itu dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban ya pak?
Interviewee	Iya, laporan pertanggung jawaban terus ada verifikasi ke lapangan dan itu dikirim ke Jakarta dan diverifikasi lagi, betul tidak kegiatan yang dilakukan.
Interviewer	Hal tersebut dilakukan agar proyek EPASS ini melalui penggunaan dananya dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik ya pak, jadi semua itu sudah tertuang dalam proposal ya pak.. sebelum menerima dana apakah tim LPKD mengajukan proposal terlebih dahulu?
Interviewee	Iya ada proposal, jadi proposal itu merincikan apa yang akan dilaksanakan terhadap dana yang akan dikucurkan oleh UNDP. Proposal itu disusun bersama-sama antara LPKD, tim pendamping, dari Kepala Desa juga ikut, dari tim EPASS, dari Balai Besar Taman Nasional.

Interviewer	Berarti ketika sudah sampai ditahap terakhir untuk penutupan anggaran ini mereka harus mempresentasikan laporan pertanggung jawabnya itu ya pak?
Interviewee	Iya harus, bahkan itu hari dulu pada covid 2020 jadi LPKD kita panggil ke kantor Balai untuk mempresentasikan apa kegiatan yang sudah mereka laksanakan menggunakan dana <i>small grant</i> itu dipresentasikan melalui <i>zoom meeting</i> di depan <i>Project Management Unit</i> pusat di Jakarta.
Interviewer	Baik pak, untuk pertanyaannya saya sudah selesai terimakasih pak atas informasi dan jawabannya sudah sangat melengkapi untuk penelitian saya.
Interviewee	Oke sukses ya
Interviewer	Aamiin terimakasih ya pak, semoga sehat selalu Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu
Interviewee	Iya aamiin, sama-sama
Interviewer	Saya izin <i>end meeting</i> ya pak
Interviewee	Oke baik.

3. Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat-Zarlif S.P

Interviewer	Saya izin menginfokan pak bahwa sebelum kita masuk ke sesi wawancara saya akan menanyakan sekita empat pertanyaan ya pak dan izin apabila nanti ada yang kurang paham saya akan mengajukan pertanyaan lagi, bisa kita mulai ya pak?
--------------------	---

Interviewee	Iya silahkan
Interviewer	Seperti yang kita ketahui bahwa proyek EPASS ini telah dijalani mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ini merupakan proyek dukungan dari <i>United Nation Development Programme</i> atau UNDP dan dibantu oleh GEF dalam pendanaan, nah bapak sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat selama proyek EPASS ini berlangsung bagaimana proses pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan?
Interviewee	Ya baik, terimakasih adik zelya tadi ya.. oke Proyek EPASS ini dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu sebagaimana yang adik sampaikan tadi bahwa ini merupakan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang biasa dikenal dengan KLHK bersama UNDP dan dapat dukungan pendanaan dari GEF sebagaimana yang adik jelaskan tadi, dan saya Zarlif direkrut sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat untuk Taman Nasional Lore Lindu, Taman Nasional Lore Lindu ini berada di Sulawesi Tengah dan Unit Pengelola Teknis (UPT) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu disini nama kantornya Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, dan melalui proyek EPASS ini posisi saya sebagai pengembangan masyarakat selama proyek EPASS itu memang awal mulanya kegiatan-kegiatan di tingkat tapak atau di tingkat desa itu merupakan tanggung jawab saya jadi ini merupakan upaya saya merangkul masyarakat agar bisa mengenal dan memahami proyek ini akan dilaksanakan. Nah upaya untuk pengembangan kapasitas masyarakat itu untuk menentukan tujuannya adalah agar masyarakat bisa memahami bagaimana pengelolaan kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan masyarakat bisa berupaya untuk meningkatkan ekonominya dengan dukungan

	<p>dana hibah yang akan diberikan oleh UNDP, nah hal-hal yang menjadi capaian utama sebagai pengembangan masyarakat itu adalah bagaimana terwujud pengelolaan bersama antara Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan masyarakat sekitar kawasan hutan, karena ini yang adik teliti itu adalah di Desa Simoro dan di Desa Pakuli Utara. Jadi untuk Desa Pakuli Utara dan Desa Simoro upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan itu tentu berawal dari proses sosialisasi, sosialisasi yang kami lakukan mulai dari pemerintah desa juga tokoh-tokoh masyarakat untuk memahami proyek ini agar tujuannya bisa tercapai, nah setelah sosialisasi kemudian kami juga bersama Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu mengupayakan agar tercipta kesepakatan konservasi masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau PKS jadi Perjanjian Kerja Sama ini merupakan landasan agar pemerintah desa dalam hal ini sebagai keterwakilan masyarakat bisa melakukan pengelolaan atau mendapat akses kelola dari pemerintah terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu, nah yang dikelola oleh masyarakat itu adalah zona tradisional, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu dikelola berdasarkan sistem zonasi ada zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona tradisional, zona tradisional inilah yang diberi akses kepada masyarakat yang ada di Desa Simoro dan Desa Pakuli Utara. Nah, itu untuk sementara</p>
<p>Interviewer</p>	<p>Oke saya lanjut untuk pertanyaannya ya pak.. dalam pelaksanaan di tingkat desa apakah dilakukan secara terbuka?</p>
<p>Interviewee</p>	<p>Ya jadi proyek ini dilakukan secara terbuka dalam artian proyek ini disosialisasikan kepada masyarakat luas, jadi kami mengundang atau melakukan koordinasi dengan pemerintah desa kemudian pemerintah desa kami minta untuk mengundang warganya agar</p>

	<p>hadir di dalam pertemuan desa agar kami tim EPASS bersama Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu melakukan sosialisasi tentang proyek yang akan dilaksanakan, selain di tingkat desa proyek ini juga disosialisasikan kepada pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten.</p>
Interviewer	<p>Oke, berarti setiap dilakukan pertemuan warga-warga desa juga turut hadir ya pak?</p>
Interviewee	<p>Iya.</p>
Interviewer	<p>Selain itu apakah EPASS sendiri memberikan sumbangsih terhadap masyarakat?</p>
Interviewee	<p>Proyek EPASS ini adalah ingin mewujudkan pengelolaan bersama antara Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan masyarakat, jadi antara Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu itu dan masyarakat setempat bisa berkolaborasi untuk bekerja sama mengelola kawasan. Nah melalui proyek EPASS ini setelah terbentuk Perjanjian Kerja Sama kemudian menyusun rencana pelaksanaan program dan setelah itu disusun lagi Rencana Kegiatan Tahunan atau (RKT) melalui program-program yang telah disusun kemudian EPASS memberikan sumbangsih dalam artian dukungan teknis kepada masyarakat dan masyarakat di desa itu dibentuk sebuah lembaga lokal namanya Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) nah jadi EPASS memberikan sumbangsih untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Pengelola Konservasi Desa untuk menyusun rencana-rencana kegiatan nah kemudian secara teknis juga kami dari EPASS memberikan pendampingan kepada LPKD untuk menyusun proposal sebagaimana yang telah disusun dalam program-program kemudian dilakukan kegiatan supaya bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari UNDP, kami bantu kami dampingi membuat</p>

	<p>proposal kegiatan dan proposal kegiatan tersebut melalui proyek itu sudah ada ketentuan dana hibah yang diberikan sebesar 150 juta untuk masing-masing Lembaga Pengelola Konservasi Desa jadi sumbangsih yang diberikan selain dukungan pendampingan peningkatan kapasitas LPKD dan masyarakat juga sumbangsih dukungan pendanaan atau dana hibah agar mereka bisa merealisasikan kegiatan yang sudah disusun dalam proposal.</p>
Interviewer	<p>Lalu, selama EPASS ini berjalan apakah ada hambatan dalam menjalankan kemitraan dan pengembangan dalam program EPASS ini?</p>
Interviewee	<p>Oke jadi sebelum saya sampaikan hambatan, melalui proyek ini juga di Desa Simoro dan Pakuli Utara, bentuk-bentuk yang sudah teralisasi itu secara umum di Pakuli Utara ada kegiatan untuk pengelolaan kawasan konservasi mereka untuk mengembangkan wisata alam air panas dan penangkaran Maleo, karena Maleo ini merupakan salah satu satwa endemik yang harus dilindungi dan Maleo ini salah satunya berada di Sulawesi Tengah kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Jadi Lembaga Pengelola Konservasi Desa itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga dan melestarikan habitat atau tempat hidup Maleo yang sangat berdekatan dengan kampung mereka agar tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat sekitar, dan untuk Simoro selain upaya-upaya untuk kegiatan konservasi mereka membuat hutan pendidikan di desa dan juga mereka membuat rumah produksi bagi kaum perempuan agar bisa mengembangkan usaha-usaha produktif untuk menambah penghasilan agar bisa mengurangi aktivitas suami mereka di dalam kawasan karena mereka sudah mendapat <i>income</i> tambahan. Nah itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa Simoro dan juga Desa Pakuli Utara. Nah apa hambatan yang ditemukan di lapangan dalam</p>

menjalankan kemitraan ini, hambatan pertama itu adalah bahwa masyarakat di sekitar kawasan utamanya yang sudah terlanjur berkebun dan beraktivitas di dalam kawasan itu terkadang tidak bisa langsung menerima program yang kami tawarkan atau yang kami sampaikan karena mereka mencurigai jangan-jangan mereka akan dikeluarkan dari kawasan atau kebun mereka akan dimusnahkan, namun melalui program ini sebenarnya keterlanjuran yang sudah ada di dalam kawasan itu dimasukan ke dalam zona tradisional dengan beberapa ketentuan mereka tidak boleh lagi menambah luasan, namun menjaga area kebunnya dengan menambah atau memperkaya tanaman-tanaman kayu-kayuan agar fungsi konservasi itu tetap berlangsung, nah kemudian hambatan lain yang kami temukan selama menjalankan proyek ini dengan terjadinya bencana alam pada tanggal 28 september 2018 banyak rumah warga baik itu di Desa Simoro dan Pakuli Utara mengalami kerusakan berat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wilayah Sulawesi Tengah khususnya yang berada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu merupakan wilayah patahan Palu Koro aktif, pada kejadian 28 September banyak terjadi kerusakan fisik rumah warga dan ini menjadi hambatan ketika kami ingin melaksanakan pekerjaan bersama mereka, masyarakat atau anggota LPKD fokus untuk membenahi rumahnya dan juga dengan kejadian tersebut akses transportasi itu agak sulit jadi terganggu karena ini ada kejadiannya dengan kejadian tsunami otomatis barang jadi naik karena mereka membangun bangunan fisik membangun bangunan rumah produksi dan juga membangun penagkar maleo nah bahan-bahan bangunan yang disusun dengan harga yang telah ditentukan itu berubah sebagaimana dalam proposal, jadi perubahan-perubahan harga itu juga menjadi hambatan atau tantangan yang kita hadapi di lapangan

	<p>untuk harus disesuaikan kembali. Kemudian tantangan selanjutnya ketika 2019-2020 masuk situasi pandemi atau Covid-19 nah itu menambah sulitnya kegiatan kami bersama masyarakat karena adanya pembatasan-pembatasan pertemuan bersama warga, namun hambatan atau tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi karena koordinasi kami dengan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bersama dengan pemerintah desa termasuk Lembaga Pengelola Konservasi Desa tetap dilakakukan. Jadi begitu informasinya</p>
Interviewer	<p>Baik kembali ke hambatan tadi, bahwa telah disebutkan beberapa mulai dari adanya perkebunan warga yang sudah terlanjur masuk di kawasan Taman Nasional, adanya masyarakat yang fokus membenahi rumah mereka akibat gempa serta akses transportasi yang terbatas dan juga perubahan harga bangunan karena terjadinya tsunami serta terjadinya pandemi di tahun 2019 hingga 2020, hal tersebut bukan menjadi hambatan bagi EPASS sendiri karena koordinasi yang dilakukan antara pihak EPASS dan Balai Taman Nasional Lore Lindu dilakukkan dengan baik ya pak?</p>
Interviewee	<p>Ya jadi hambatan-hambatan tadi itu dapat diatasi karena EPASS inikan dilaksanakan di Lore Lindu dan kami juga berkantor di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu nah bersama Balai karena mereka juga punya personil dan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama dan di tingkat desa juga sudah terbentuk Lembaga Pengelola Konservasi Desa sehingga koordinasi itu bisa tetap berjalan dengan baik, jadi dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada kelembagaan formal yang terbentuk di tingkat desa itu juga membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan.</p>
Interviewer	<p>Oke, berarti bapak sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat sering melakukan kunjungan untuk memantau langsung di lapangan</p>

	ya pak?
Interviewee	Iya, jadi aktivitas yang kami lakukan di tingkat lapangan itu rutinitasnya boleh dikata setiap hari karena di tingkat desa kami juga merekrut namanya tenaga pendamping desa itu adalah tenaga orang lokal yang berpendidikan sarjana yang kami rekrut menjadi pendamping desa untuk membantu kami juga mendampingi rutinitas kegiatan di lapangan.
Interviewer	Selain adanya LPKD dari tenaga orang lokal ini juga membantu ikut serta dalam proyek EPASS ini?
Interviewee	Iya, jadi selain kami sebagai Tenaga Ahli Masyarakat yang direkrut oleh peyek EPASS ini kemudian setelah melihat perkembangan di lapangan bahwa butuh tenaga pendamping desa sehingga proyek EPASS juga merekrut tenaga pendamping desa yang berdiam dan berdomisili di tempat tersebut. Kalau kami kan harus memperhatikan karena proyek EPASS ini banyak tempat yang harus dikunjungi di lapangan, begitu.
Interviewer	Baik pak
Interviewee	Masih ada yang perlu ditambahkan?
Interviewer	Saya rasa cukup ya pak pertanyaannya.
Interviewee	Baik, nanti kalau ada hal-hal yang kurang silahkan kontak lagi untuk bisa dikomunikasikan ya.
Interviewer	Baik pak, terima kasih banyak pak atas waktunya terima kasih juga untuk jawabannya yang sangat jelas dan berguna bagi saya pak. Semoga bapak dan keluarga sehat selalu ya pak
Interviewee	Aamiin, mudah-mudahan lancar ya

Interviewer	Aamiin, Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu
Interviewee	Wa'alaikumssalam warrahmatullahi wabarakatuhu

4. Ketua Lembaga Pengelola Konservasi Desa – Azir S.Pd

Interviewer	Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proyek EPASS ini sudah berjalan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ya pak?
Interviewee	Betul.. betul..
Interviewer	Ya jadi sebagai ketua Lembaga Pengelola Konservasi Desa atau LPKD di Desa Pakuli Utara, bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan selama proyek EPASS ini mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020?
Interviewee	Proses pemberdayaan yang dilakukan itu ada tahapan sosialisasi pertama dilakukan oleh manajer proyek EPASS di desa Pakuli Utara dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat pada waktu itu awal mulanya, sosialisasi ada beberapa sosialisasi hingga kita melaksanakan PKS antara pemerintah desa Pakuli Utara bersama Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu. Lalu kemudian pemerintah desa Pakuli Utara membentuk namanya kelompok Lembaga Pengelola Konservasi Desa dinamakan LPKD Singgani pada saat itu, nah anggota yang terlibat di dalamnya itu ada beberapa lapisan masyarakat juga termasuk ada beberapa pemerintah desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lalu kemudian tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Konservasi Desa tersebut, ya sementara itu. Ada pertanyaan lanjutan?
Interviewer	Selama upaya pemberdayaan berlangsung apakah ada dukungan

	dana yang diberikan kepada LPKD?
Interviewee	Ya, pada waktu itu kita diberikan dukungan dana dari EPASS sebanyak 150 juta tapi dalam persyaratan untuk penuruna dana itu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh LPKD, semacam pembuatan proposal, pertama dulu penggalian informasi kemudian membuat RPP RKT, itu pelaksanaannya.
Interviewer	Oke lalu bagaimana mekanisme penerimaan dana tersebut?
Interviewee	Seperti yang saya sampaikan tadi, mekanisme penerimaan dana tersebut LPKD itu membuat rancangan program namanya RPP rencana pelaksanaan program, selama PKS itu berjalan. Lalu kemudian kita menyusun Rancangan Kegiatan Tahunan (RKT) nah lalu kita membuat (RAB) Rancangan Anggaran Biaya di dalam pelaksanaan program untuk diajukan sebagai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh EPASS tersebut.
Interviewer	Oke, ada dukungan dana dan sudah dijelaskan mekanisme penurunan dana, dan pertanyaan yang saya ingin tanyakan bagaimana penggunaan dan mekanisme laporan pertanggungjawaban dana tersebut?
Interviewee	Ya tentunya LPKD menerima anggaran berdasarkan tahapan, sebanyak 148.998.000.000 ribu rupiah nah anggaran itu di transfer ke rekening anggota langsung, namun dalam pengambilannya itu ada tahapan yang dilakukan, LPKD itu kemudian membuat RAB untuk pengambilan tahap pertama dengan 35 persen dari jumlah 150 juta, kemudian tahapan kedua itu 45 persen dari jumlah 150 juta kemudian tahap ke tiga 20 persen. Terkait dengan transparansi anggaran ini kita ada rapat-rapat evaluasi penggunaan anggaran di tingkat kelompok. Dan kemudian anggaran ini diperuntukan untuk

program fokus prioritas itu adalah *sanctuary Maleo*, sebetulnya LPKD itu fokus pada ekowisata namun kita spesifikkan kegiatan ini fokus pada *sanctuary Maleo* dimana anggota LPKD ini melaksanakan program penangkaran burung Maleo, namun sejak dulu memang penangkaran ini sudah ada yang dilakukan oleh teman-teman yayasan Jambata tahun 2006-2007 kalau tidak salah, namun ada jembatan yang putus sehingga akses kita melaksanakan aktivitas penangkaran maleo itu juga terputus atau terbatas pada saat itu. Namun ada program ini yang masuk teman-teman LPKD menginisiasi program itu untuk dilaksanakan kembali untuk penangkaran burung Maleo, selain penangkaran burung Maleo ada juga diprogramkan oleh teman-teman LPKD yaitu penanaman atau pembibitan pohon pakan Maleo itu kita fokus pada pohon kemiri, lalu kemudian LPKD membuat rumah jaga atau pos jaga untuk teman-teman mengawasi orang-orang masuk kawasan atau habitat burung Maleo. Tapi dari anggaran itu, teman-teman LPKD membuat kandang penangkaran ada dua kandang dengan ukuran 4x6, 1 unit untuk penanaman telur, lalu kemudian 1 kandang dengan ukuran yang sama itu untuk pembesaran burung Maleo atau penangkaran burung Maleo, masing-masing itu bisa dikatakan permanen ya karena kita menggunakan rangka baja untuk pembuatan kandang itu. Saya kira itu fokus anggaran untuk pelaksanaan anggaran teman-teman di tingkat LPKD. nah tahapan pertama itu kita diberikan anggaran dengan acuan program atau RAB, kita teman-teman LPKD melaksanakan program itu mencapai anggaran dari 50 persen tahapan pertama itu, lalu kemudian kita buat laporan pertanggungjawaban, kemudian diterima laporan pertanggungjawaban kemudian muncuk rekomendasi tahapan kedua pencapaian, begitu seterusnya.

Interviewer	Laporan pertanggung jawaban tadi diserahkan ke?
Interviewee	Di serahkan kepada pihak <i>manager</i> EPASS
Interviewer	Jadi apakah perencanaan program dari LPKD itu sendiri apakah tercapai?
Interviewee	Iya semuanya program itu tercapai kita laksanakan, dan kami sempat berhasil kami berhasil menetasakan burung Maleo sebanyak 11 butir namun dari 19 telur ada 8 yang busuk mungkin persoalan teknis sehingga yang 8 butir itu tidak berhasil.
Interviewer	iya, selain pemberian bantuan dana apakah ada bantuan lainnya yang diberikan dari EPASS ini?
Interviewee	Sebetulnya EPASS banyak hal yang diberikan EPASS pada anggota kelompok, ada pada waktu itu peningkatan kapasitas anggota dengan kegiatan-kegiatan di luar dari anggaran dengan dana 150 juta tadi, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan dengan EPASS, ada fasilitator pendampingan kelompok itu mendampingi kelompok melaksanakan program
Interviewer	Jadi dari pihak EPASS ini atau UNDPnya sendiri menyediakan ahli-ahli di bidang tertentu untuk mendampingi kelompok?
Interviewee	Iya, karena EPASS merekrut fasilitator atau pendamping untuk mendampingi kelompok
Interviewer	Oke, satu pertanyaan lagi saya ingin menanyakan LPKD sendiri bagaimana melihat masyarakat apakah ada perubahan yang dialami oleh masyarakat setempat?
Interviewee	Saya kira ini pertanyaan yang bagus, memang sebelum kita menginisiasi program ini memang aktivitas masyarakat itu ke

	<p>kawasan itu memang tak terbedung dengan adanya pengambilan telur penangkaran selain manusia juga ada gangguan predator-predator hewan lainnya yang memangsa burung Maleo, aktivitas manusia disekitaran habitat itu memang ada kebun-kebun masyarakat tetapi dengan adanya Lembaga Pengelola Konservasi Desa ini memberikan pemahaman-pemahaman terkait hutan, satwa, terkait burung Maleo ini sehingga masyarakat itu membatasi diri untuk masuk ke kawasan itu bahwa kawasan itu kawasan yang dilindungi walaupun itu termasuk pada zona HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) tetapi itu kita berikan sebagai zona yang memang orang tidak bisa masuk sembarang karena ada habitat atau satwa yang dilindungi termasuk burung Alo dan Maleo.</p>
Interviewer	<p>Apa yang melatar belakangi masyarakat setempat untuk memasuki kawasan taman nasional?</p>
Interviewee	<p>Memang karena ada ekonomi disana, mungkin ada pengambilan rotan, pengambilan kayu, bambu dan kawasan itu bisa ditanami oleh tanaman-tanaman produktif semacam tanaman lainnya, coklat, alpokat, dan lain sebagainya tapi sudah dibatasi selama LPKD ini berdiri hampir kurang masyarakat yang berkebun itu masuk ke dalam kawasan karena itu masuk wilayah taman nasional.</p>
Interviewer	<p>Jadi bisa dibilang karena keterbatasan ekonomi mereka mencari jalan lain untuk menemukan mata pencaharian untuk memperoleh penghasilan?</p>
Interviewee	<p>Iya, nah makanya fokus LPKD itu ekowisata, ekowisata itu untuk menarik kunjungan-kunjungan parawisata tempat-tempat ekowisata bisa dijadikan sebagai tempat penelitian dan kemudian juga teman-teman LPKD menginisiasi arum jeram tempat wisata di sebelah sungai dari batas habitat itu, sehingga ada ekonomi baru yang hadir</p>

	itu LPKD mulai pikirkan kembali terkait dengan pengembangan ekowisata.
Interviewer	Tadi sudah disebutkan bahwa ada fasilitator atau tenaga-tenaga yang diutus oleh UNDP ya? Saya ingin menanyakan apa peranan tersebut yang diberikan kepada LPKD?
Interviewee	Iya, pada saat kita melaksanakan program dengan dukungan dana itu memang ada pendamping untuk mendampingi LPKD, peran mereka itu ada mengarahkan anggota kelompok, membimbing dengan ilmu atau pengetahuan kapasitas yang mereka miliki. Lalu kemudian penyambung koordinasi atau komunikasi kepada pihak EPASS, ada hal-hal yang <i>urgent</i> atau hal-hal yang teknis untuk disampaikan mungkin pendamping mengawali memberikan informasi kepada kita lebih kepada koordinasi, agar memudahkan pelaksanaan program ini, sebagai penyambung lidah mungkin berkoordinasi dengan proyek EPASS.
Interviewer	Saya rasa pertanyaan sudah terjawab dengan sempurna, informasinya juga sudah saya dapatkan terima kasih banyak ya pak Azir atas waktunya dan terimakasih juga sudah bersedia menjadi narasumber di penelitian saya kali ini, semoga sehat selalu ya pak.
Interviewee	Iya sama-sama, Aamiin
Interviewer	Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu
Interviewee	Wa'alaikumssalam warrahmatullahi wabarakatuhu

5. Ketua Lembaga Pengelola Konservasi Desa – Ilham

Interviewer	Saya izin untuk merekam pembicaraan ini ya pak
--------------------	--

Interviewee	iya iya boleh boleh
Interviewer	seperti yang kita ketahui bersama bahwa EPASS ini merupakan proyek dukungan dari organisasi internasional yaitu UNDP dan dibantu danai oleh GEF di taman nasional lore lindu yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat disekitar kawasan. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan selama proyek EPASS ini berlangsung dari tahun 2016 hingga tahun 2020?
Interviewee	Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Ilham selaku ketua LPKD yang berjumlah 20 orang dengan berbagai macam seksi. Disitu ada tiga seksi, yang pertama itu seksi pengawetan, kemudian seksi perlindungan dan seksi pemanfaatan. Itu kronologi kedudukan yang ada di LPKD cinta lingkungan Desa Simoro. Pada tahun 2016, ketika program EPASS datang ke Desa Simoro, itu tahapan melalui informasi dari sek EPASS melalui pemerintah Desa Simoro, kemudian pemerintah desa Simoro menyampaikan kepada lembaga kepala dusun, RT untuk mengumpulkan warga dengan adanya itu program EPASS yang akan datang ke Desa Simoro. itu awalnya informasi pertama
Interviewer	Jadi untuk pengenalan proyek EPASS ini sendiri diberitahukan terlebih dahulu ke pemerintah desa baru ke Dusun dan RT,

	<p>kemudian pihak dusun dan RT mengumpulkan warganya untuk mengikuti sosialisasi sebagai pengenalan pemahaman proyek EPASS ini ya pak?</p>
Interviewee	<p>Iya, setelah kami dikumpulkan pada waktu itu dengan jumlah kurang lebih sekitar 30 orang dihadiri oleh masyarakat kemudian pihak EPASS waktu itu datang untuk mensosialisasikan program itu bersama pemerintah desa di kantor desa. Seperti itu kemaren yang dilakukan oleh pihak EPASS.</p>
Interviewer	<p>Sebagai pihak pengelola konservasi Desa, apa saja proses pemberdayaan yang sudah dilakukan pak?</p>
Interviewee	<p>Proses pemberdayaan itu, yang dilakukan yang pertama-tama pihak EPASS dalam hal ini bagian teknik itu, menyampaikan tentang kronologi datangnya program EPASS yang ada di Desa Simoro yang dalam hal ini selaku desa yang berbatasan langsung dengan taman nasional Lore Lindu. Dalam tahapan itu, ada beberapa tahapan yang kami ikuti. Ada pembuatan RKT dan RTTnya itu semua disampaikan oleh pihak EPASS.</p>
Interviewer	<p>Baik. Apakah selama pembuatan tersebut tim masyarakat desa Simoro ini dibantu oleh pihak EPASS?</p>

Interviewee	Ya, sangat dibantu oleh pihak EPASS sehingga kemaren, tahapannya itu ada beberapa kali dilakukan oleh pihak EPASS pertemuan ditingkat masyarakat sebelum terbentuknya LPKD .
Interviewer	Selama upaya pemberdayaan berlangsung, apakah ada dukungan dana yang diberikan kepada LPKD, pak?
Interviewee	Ya, kami dari LPKD cinta lingkungan desa Simoro menerima dana pengabdian dari EPASS sebesar Rp.140.000.000
Interviewer	Baik. Bagaimana mekanisme penerimaan dana tersebut?
Interviewee	Mekanisme penerimaan dana tersebut itu melalui tahapan. Yang pertama tahapan yang kami terima itu sebesar 30% kalau tidak salah ingat saya. Kemudian 30% yang cair itu, kami membuka rekening BNI kemarin, itu kami sendiri pengurus LPKD membuka rekening, kemudian proses itu di transfer melalui bank. Kemudian, ada rekomendasi dari pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu selaku yang membuat pihak kerja sama antara Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan pihak LPKD.
Interviewer	Baik. Berarti dana dari EPASS ini langsung di transfer ke rekening dari LPKD sendiri ya, pak?
Interviewee	Iya, benar.

Interviewer	Ingin memastikan saja, dalam penerimaan dana tersebut dilakukannya beberapa tahapan, lalu saya ingin menyakan dari dana tersebut hal-hal apa saja yang dilakukan LPKD?
Interviewee	Yang dilakukan LPKD sesuai dengan proposal yang diajukan itu kepada pihak proyek EPASS itu 35 juta itu tahap pertama, setelah itu kami belanjakan sesuai dengan proposal, bikin laporan pertanggungjawaban pihak LPKD kepada pihak proyek EPASS setelah itu ada penelitian kembali apakah memang laporan itu sesuai dengan dana yang diterima dengan LPKD, setelah itu baru masuk tahap berikutnya sekitar 60 persen,
Interviewer	Dan dari dana yang sudah turun tersebut apa saja yang sudah dilakukan oleh LPKD?
Interviewee	Yang kami lakukan pertama itu di Desa Simoro itu ada kelompok ibu-ibu yang kami coba bina melalui dana EPASS dari tahun 2016 selama kerja sama 5 tahun pihak kelompok ibu-ibu itu untuk menambah nilai ekonomi mereka membuat keripik tortilla, dalam pembuatan keripik tortilla ini mereka sangat membutuhkan alat-alat untuk mendukung produk yang mereka buat, salah satunya rumah produksi yang akan mereka butuhkan untuk usaha keripik tortilla itu sendiri.
Interviewer	Apakah ada fasilitas atau tim pendukung yang diberikan oleh EPASS untuk mengawasi atau membantu kelompok-kelompok usaha ini pak?
Interviewee	Kalau dari EPASS itu ada tim pendamping desa dibentuk untuk membantu pengelolaan yang diberikan kepada kami, kemudian ada juga fasilitator desa yang dibentuk oleh pihak EPASS untuk

	mendampingi kami dalam pengelolaan dana <i>small grant</i> EPASS.
Interviewer	Baik, dan bagaimana penggunaan dan mekanisme penggunaan dan mekanisme laporan pertanggung jawaban dari dana tersebut? Apakah setelah mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dituangkan laporan pertanggungjawaban pak?
Interviewee	Ya, untuk laporan pertanggungjawaban kami itu secara tertulis kemudian didampingi oleh tim pendamping kemudian tidak terlepas dari pantauan pemerintah desa dalam pelaporan itu jadi kami melaporkan dana yang kami lakukan itu secara tertulis menggunakan nota toko sebagai dukungan, kemudian menggunakan materai 6000 pada waktu itu.
Interviewer	Berarti pemerintah desa Simoro juga turut berpartisipasi dalam proyek ini ya pak?
Interviewee	Sangat turut berpartisipasi dalam proyek EPASS
Interviewer	Selain itu, apakah dari penggunaan dana tersebut yang diberikan oleh EPASS sendiri apakah ada bantuan lain yang diterima oleh LPKD?
Interviewee	Untuk ini, selesai bantuan <i>small grant</i> kami LPKD Cinta Lingkungan ada dari Kementerian LHK memberi bantuan lagi kepada kelompok ibu-ibu ini sebesar 50 juta itu sementara proses yang kami lakukan sekarang ini.
Interviewer	Baik, dari adanya proyek EPASS ini tim kelompok ibu-ibu tersebut sebelumnya sudah melakukan usaha keripik itu ya pak? Namun alat-alatnya belum memadai?
Interviewee	Iya kemarin kelompok ini adalah bentukan dari pemerintah desa mereka ada 10 orang dilatih di Masamba, setelah itu mereka

	<p>kembali ke tempat. Setelah itu ada isu masuk tahun 2016 tentang proyek EPASS yang akan melakukan pemberdayaan disekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu kepada desa-desa yang berbatasan dengan kawasan taman nasional, itu melalui pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu sehingga kami melakukan perjanjian kerja sama melalui pihak Balai dan bekerja sama dengan pemerintah desa dan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Simoro.</p>
Interviewer	<p>Kelompok ibu-ibu ini mendapatkan bantuan dana ya pak?</p>
Interviewee	<p>Baik saya sampaikan, setelah mereka dibentuk oleh pemerintah desa untuk usaha keripi tortilla ini mereka sempat berhenti dengan kendala mereka harus memiliki rumah produksi dengan anggaran yang begitu besar, ketika datang proyek EPASS kami coba kerja sama dengan pemerintah desa untuk menyampaikan kepada pihak EPASS, apakah layak kelompok ibu-ibu ini dibantu dalam program EPASS</p>
Interviewer	<p>Baik, setelah pengajuan tersebut dan pihak balai menyetujui sehingga terjadinya kelompok usaha tortilla ini berjalan sampai sekarang ya pak?</p>
Interviewee	<p>Iya sampai sekarang.</p>
Interviewer	<p>Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir pak dari saya, apakah ada hambatan selama dilakukan proyek EPASS?</p>
Interviewee	<p>Ya, dalam satu kelompok dinamika itu tidak bisa kita pungkiri biar bagaimanapun namanya kelompok, sebagai pengurus kita harus mampu mengakomodir semua pendapat anggota. Salah satu kendala yang kita hadapi adalah ketika sudah berjalan baik kelompok ibu-ibu ini tentang saran, sehingga kami sebagai ketua LPKD dan</p>

	pemerintah desa serta pihak Balai untuk mencari solusi bagaimana cara kita dengan mereka saling bekerja sama untuk mencari pintu-pintu agar produk mereka ini tidak tersendat.
Interviewer	Apakah di tahun-tahun selama berlangsungnya EPASS ini ada hambatan pak?
Interviewee	Ya ketika terjadinya gempa tahun 2018 kemarin itu sangat menghambat aktivitas para kelompok ibu-ibu dimana mereka masih ada rasa trauma sehingga kemarin itu mereka meluangkan waktu ke keluarga, setelah itu pulihnya pasca gempa kemarin mereka beraktivitas kembali lagi, saya dapat informasi kemarin ketika saya cek mereka sudah bisa menyumbangkan sebidang tanah untuk ibadah sebesar 7 juta rupiah itu yang mereka sumbangkan kepada masyarakat desa simoro kemudian tanah lokasi gereja. Terkait dengan Covid-19 kemarin malah terbalik, dikelompok saya dapat pesanan karena di kelompok itu yang kami rekrut kemarin ada instan jahe dan kunyit asam dimana itu memberikan daya tahan tubuh bagi manusia dan imunnya agar bisa bertahan, sehingga pada waktu pandemi itu saya dapat informasi dari kelompok ini mereka dapat kemasan dari Sulawesi Barat sebanyak 2000 kemasan.
Interviewer	Apakah masyarakat desa ada yang melakukan aktivitas dalam kawasan taman nasional pak?
Interviewee	Alhamdulillah, sejak turunnya proyek EPASS dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh proyek EPASS terkait dalam hal ini baik balai taman nasional dan pemerintah desa serta LPKD, tidak dipungkiri juga dengan tekanan aktivitas dalam kawasan sudah tidak ada sama sekali. Karena saya juga salah satu tenaga kerja yang direkrut oleh pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu sebagai tenaga kontrak PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai

	<p>Negeri) jadi keadaan kawasan Taman Nasional Lore Lindu hubungannya dengan proyek EPASS yang ada disekitar kawasan ini sangat berpengaruh besar. Data yang saya peroleh kemarin, kawasan desa simoro itu memiliki lahan 150 hektare sebelum masuknya proyek EPASS sehingga yang sudah mereka miliki dengan zona yang ditetapkan adalah zona tradisional dengan tidak menambah lagi luas kebun yang ada di kawasan. Sehingga dengan adanya program yang diturunkan pemerintah ini sangat mendukung lestarnya hutan dan keberadaan di sekitar kawasan, saya katakan keberhasilan LPKD ini bukan hanya kekuatan LPKD ini sendiri tetapi ini semua dari beberapa dukungan elemen termasuk masyarakat, pemerintah desa, pihak EPASS, pendamping fasilitator desa ini semua menjadi dukungan sehingga keberhasilan ini bukan hanya karena LPKD itu sendiri.</p>
Interviewer	<p>Saya rasa terkait pertanyaan ini sudah sangat cukup pak, saya berterimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian saya pak.</p>
Intevieewe	<p>Ya tidak apa-apa, kalau nanti masih membutuhkan informasi LPKD yang lebih detail saya akan siapakan waktu untuk adik</p>
Interviewer	<p>Baik pak terima kasih banyak, kita boleh akhiri untuk wawancaranya ya pak semoga sehat selalu pak.</p>
Interviewee	<p>Iya Aamiin</p>
Interviewer	<p>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu</p>
interviewee	<p>Walaikumssalam Warrahmatullahi Wabarakatuhu</p>

6. Kepala Desa Simoro – Tahir Nasri

Interviewer	<p>Sebelum masuk ke sesi wawancara, saya ingin menginfokan bahwa</p>
--------------------	--

	saya akan menanyakan sekitar 8 pertanyaan dan pertanyaan ini tidak lain dan tidak bukan ada keterkaitan antara pemerintah desa dan proyek EPASS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proyek EPASS ini berjalan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dan Desa Simoro ini menjadi salah satu terget pemberdayaan masyarakat di proyek EPASS ini ya pak
Interviewee	Iya betul
Interviewer	Untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pertanyaan pertama ya pak, jadi melalui proyek ini bagaimana pendapat pemerintah desa terhadap proyek ini pak?
Interviewee	Jadi pendapat kita sebagai pemerintah desa dalam proyek ini sangat membantu masyarakat untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya menjaga kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Interviewer	Lalu, apakah ada hal yang terwujud dari adanya proyek EPASS ini di desa Simoro?
Interviewee	Yang terwujud adanya perjanjian kerja sama antara Taman Nasional Lore Lindu dengan pemerintah desa khususnya rencana pelaksanaan program selama 5 tahun, jadi kemudian terbentuknya Lembaga Pengelola Konservasi Desa atau LPKD. Disini ada namanya usaha yang dibantu oleh Balai Taman Nasional namanya usaha keripik tortilla.
Interviewer	Lalu, apakah ada perjanjian kerja sama antara Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan pemerintah desa pak?
Interviewee	Iya dalam hal ini pemerintah desa itu melakukan pemberdayaan masyarakat yang saya sampaikan tadi, kemudian masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, jadi ada perjanjian antara

	taman nasional bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan buka kayu seperti rotan, kemudian pemanfaatan pohon aren untuk pembuatan gula merah, kemudian tanaman obat-obatan
Interviewer	Baik, dan bagaimana terlaksana perjanjian kerja sama tersebut?
Interviewee	Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bersama UNDP memberikan pendampingan terhadap masyarakat desa melalui kegiatan program untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Interviewer	Jadi itu tercantum dalam PKS ya pak?
Interviewee	Iya
Interviewer	Lalu dalam PKS tersebut ada yang namanya Lembaga Pengelola Konservasi Desa seperti yang sudah bapak jelasin tadi ya, jadi bagaimana dukungan UNDP atau EPASS ini kepada LPKD di Simoro?
Interviewee	Dukungan itu memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat sebagai pendamping dalam pelaksanaan proyek.
Interviewer	Terkait proyek ini apakah pemerintah desa Simoro sendiri ikut terlibat?
Interviewee	Ya ikut terlibat, bahwa pemerintah desa juga dalam pengawasan ini mengawasi masyarakat yang beraktivitas di area taman nasional, jadi kami selalu memantau dan mengawasi apabila ada masyarakat yang ada aktivitasnya di taman nasional, dan ada juga pengawasan dilakukan kepada rumah produksi kelompok usaha yang didanai oleh UNDP
Interviewer	Jadi selain terbentuknya lembaga konservasi desa, pemerintah desa Simoro sendiri pun juga ikut terlibat ya pak?

Interviewee	Iya ikut terlibat
Interviewer	Jadi bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut pak?
Interviewee	Dalam pelaksanaan pengawasan kita sebagai pemerintah desa melakukan koordinasi kepada LPKD dan kelompok usaha pembuatan tortilla dan juga tenaga pendamping, jadi kita ada koordinasi agar bagaimana perkembangan usaha, bagaimana kita meningkatkan untuk koordinasi kepada masyarakat untuk pengawasan dalam taman nasional.
Interviewer	Jadi selama berjalannya proyek EPASS ini dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tentu setiap tahunnya terlihat ada perubahan ya pak, nah dalam hal tersebut apakah terdapat hambatan selama proyek ini berjalan?
Interviewee	Memang awalnya dari 2016 itu berjalan dengan bagus hingga masuk di 2018 terjadi hambatan karena terjadinya bencana alam 28 september sehingga semua aktivitas kita terhambat, kemudian hubungan kita juga kemarin sulit saat melakukan koordinasi kepada kelompok-kelompok tersebut, kemudian masuk di 2020 terjadi lagi Covid disini ada pembatasan-pembatasan sehingga kita sulit melakukan koordinasi atau mengumpul masyarakat ini untuk melakukan usaha.
Interviewer	Oke, kalau dari pengawasan ini apakah terdapat hambatan? Entah itu dari masyarakat? terdapat masyarakat yang sering kali mungkin melanggar aturan dan tidak mau mendengar pihak berwajib, itu gimana pak?
Interviewee	Kalau untuk anggota ini mereka sendiri tetap menaati aturan, untuk sekarang ini terkait penjualan itu kemasannya masih manual, kurang

	menarik minat pembeli.
Interviewer	Tapi, selebihnya proyek EPASS itu sendiri memberi banyak bantuan ya pak bagi Desa Simoro?
Interviewee	Iya sangat banyak sekali, malah kami kemarin wakil UNDP yang datang di Simoro melihat usaha dan rumah produksi kami mengucapkan banyak terima kasih, kami sangat bersyukur telah dibantu dari Balai Taman Nasional dan UNDP tentang pembuatan rumah produksi dengan pengadaan alat-alat, karena dulu pembuatan tortilla ini masih manual sehingga adanya proyek ini masyarakat sangat terbantu. Kemarin juga dibantu dengan bagian teknisnya yaitu pendamping utama juga yang kami sangat syukuri dibantu dengan keuangan.
Interviewer	Jadi dengan adanya proyek ini bisa dibilang ada peningkatan ekonomi di desa ini?
Interviewee	Betul malah ini kelompok ini kebanyakan ibu-ibu, sehingga ada semacam lapangan kerja yang bisa menambah pendapatan dalam keluarga mereka masing-masing.
Interviewer	Oke baik, saya rasa pertanyaannya cukup sampai di sini pak, terima kasih informasinya sudah sangat membantu dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bapak sehat selalu ya pak.
Interviewee	Iya baik, Aamiin
Interviewer	Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu
Interviewee	Wa'alaikumssalam warrahmatullahi wabarakatuhu

